# RENJA 2025

JL.Rasakunda Pangkalpinang Telp/Fax.(0717)421142

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA PANGKALPINANG

# KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya sehingga Rencana Kerja ( RENJA ) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pangklapinang Tahun 2025 dapat selesai sesuai dengan yang diharapkan.

Mendasari ketentuan pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, seta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyususnan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Rencana Kerja ini sesungguhnya telah mencerminkan komitmen membangun daerah dalam tataran partisipatif, sinkronisasi, dan keberpihakan *stakeholders* terhadap Kota Pangkalpinang.

Penyusunan Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pangkalpinang merupakan perwujudan penyelenggaraan pemerintah yang bersih dan berwibawa (clean dan good goverment) serta berorintasi kepada hasil (result oriented) sesuai dengan amanah yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Akhir kata, semoga dokumen Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pangkalpinang Tahun 2025 ini dapat digunakan sebagai acuan dalam melaksanakan kinerja dan diharapkan mampu memberikan manfaat serta dampak positif bagi pihak-pihak yang berkepentingan baik secara informasi, evaluasi maupun sebagai paramenter dalam pengkatan kinerja organisasi.

Atas tersusunya Rencana Kerja ini kami ucapkan terima kasih kepada seluruh atas partisipasi dan kepeduliannya untuk memberikan saran masukan yang konstruksi. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semia, amin.

Pangkalpinang, 16 Juli 2024

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kota Pangkalpinang,

DARWIN, S.Pd. Mat
Pembina Tingkat Satu
NIP. 196807091994121002

# DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL.....

KATA PENGANTAR ..... I

DAFTAR ISI ..... II

DAFTAR TABEL ..... III

BAB I PENDAHULUAN..... 1

BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENCANA KERJA TAHUN SEBELUMNYA ..... 6

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH..... 43

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT..... 48

BAB V PENUTUP ..... 57

LAMPIRAN ..... 58

# DAFTAR TABEL


| | | Halaman |
|---|---|---|
| Tabel TC.29 | Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja ..... | 11 |
| Tabel 2.2 | Capaian Kinerja Sasaran Strategis Tahun 2023..... | 27 |
| Tabel TC.30 | Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pangkalpinang..... | 29 |
| Tabel TC.3.1 | Review Terhadap Rancangan Awal Renja RKPD Tahun 2025 .... | 35 |
| Tabel TC..32 | Usulan Program dan Kegiatan dari Pemangku Kepentingan Kota Pangkalpinang tahun 2025 ..... | 42 |
| Tabel 3.1 | Identifikasi Kebijakan Nasional ..... | 43 |
| Tabel 3.2 | Identifikasi Prioritas Pembangunan Daerah Kota Pangkalpinang tahun 2024 ..... | 46 |
| Tabel TC.33 | Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026 Kota Pangkalpinang ..... | 49 |

# LAMPIRAN

Program Kegiatan dan Pagu Indikatif Perangkat Daerah berdasarkan Permendagri Nomor 900.1.15.5.-1317 Tahun 2023

# BAB I
# PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja (Renja) Kota Pangkalpinang merupakan dokumen perancanaan perangkat daerah Kota Pangkalpinang yang digunakan sebagai bahan Penyusunan rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Pangkalpinang yang memuat Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Lokasi, dan kelompok sasaran disertai indikator kinerja, target, dan pendanaan seseuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Rancangan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Pangkalpinang Tahun 2024-2026 dan Rancangan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024-2026. Renja Perangkat Daerah digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah untuk penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Untuk itu, dalam rangka pencapaian sasaran dan prioritas pembangunan serta menjamin efektivitas dan efisiensi perencanaan di Kota Pangkalpinang sehingga dapat menghasilkan Renja Perangkat Daerah yang berkualitas, diperlukan Pedoman Penyusunan Penyempurnaan Rancangan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah. Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENJA SKPD), adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Sebagai dokumen rencana tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, Rencana Kerja (RENJA) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pangkalpinang mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan Pemerintah Daerah karena beberapa hal sebagai berikut :

1. RENJA SKPD merupakan dokumen yang secara substansial penerjemahan dari Tujuan dan Sasaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (RENSTRA) instansi sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
2. RENJA merupakan acuan OPD untuk memasukkan program kegiatan kedalam KUA dan PPAS serta perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) tahun 2025.
3. RENJA SKPD merupakan salah satu instrumen untuk evaluasi pelaksanaan program kegiatan instansi guna mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercantum dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT) sebagai wujud dari kinerja OPD pada tahun 2025 yang merupakan tahun pertama pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pangkalpinang Tahun 2024-2026.

Mengingat arti strategis dokumen RENJA SKPD dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah, maka sejak awal tahapan penyusunan hingga penetapan dokumen RENJA SKPD harus mengikuti tata cara dan alur penyusunannya

sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional danPeraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, antara lain :

1. Disusun berdasarkan evaluasi pelaksanaan RENJA tahun sebelumnya dan mengacu RKPD tahun berkenaan.
2. Program dalam RENJA 2025 harus berpedoman pada arah kebijakan dan sasaran pokok Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, Rencana Jangka Panjang Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2007 – 2025 dan Rancangan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Pangkalpinang Tahun 2024 -2026.
3. Program dan kegiatan dalam RENJA SKPD harus selaras dengan program dan kegiatan yang disepakati oleh seluruh pemangku kepentingan dalam forum MUSRENBANG.
4. Program dan kegiatan dalam RENJA dilengkapi dengan indikator kinerja hasil (outcome),indikator kinerja keluaran (output) dan dilengkapi dengan pendanaan yang menunjukkan prakiraan maju.

Adapun Bagan Alir Tahapan Penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENJA SKPD) adalah sebagaimana tercantum dalam gambar dibawah ini :

Bagan Alur Tahapan Penyusunan RENJA

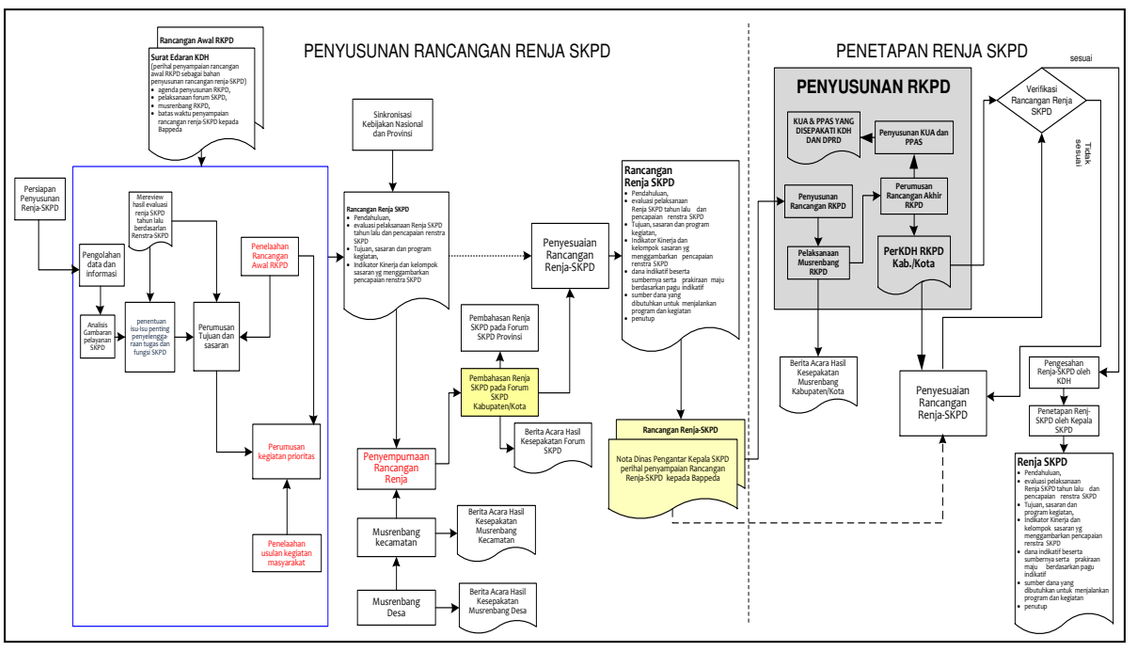


Tujuan dan sasaran merupakan hasil perumusan capaian strategis yang menunjukkan tingkat kinerja pembangunan tertinggi sebagai dasar penyusunan arsitektur kinerja pembangunan perangkat daerah secara keseluruhan.

Tujuan jangka mengengah Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pangkalpinang 2024-2026 adalah : **"Meningkatkan Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Dukcapil."**

Sasaran perangkat daerah adalah penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh sebuah organisasi pemerintah dalam waktu tahunan. Sasaran jangka mengengah Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pangkalpinang 2024-2026 adalah : **"Meningkatkan Cakupan Kepemilikan Dokumen Kependudukan dan Catatan Sipil dan Meningkatkan Rata-Rata Lama Kepengurusan Dokumen Kependudukan."**

## 1.2 Landasan Hukum

Adapun yang menjadi landasan hukum dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pangkalpinang Tahun 2025, adalah:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091), Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091),dan undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 Nomor 5 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomr 1091) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indoneisa Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1312);
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 08 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Pangkalpinang Tahun 2007-2025 (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2007 Nomor 08, Seri E Nomor 04);
13. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2016 Nomor 18); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2020 Nomor 1)
14. Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 9 Tahun 2023 Tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Pangkalpinang (Berita Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2023 Nomor 166 ).
15. Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 18 Tahun 2024 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2024 Nomor 224 ).

## 1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Rencana Kerja ini adalah sebagai acuan dalam mengevaluasi pencapaian kinerja program/kegiatan tahun 2025, dan perencanaan

program/kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pangkalpinang Tahun Anggaran 2025. Sedangkan tujuan disusunnya Rencana Kerja ini adalah untuk memasukkan program dan kegiatan yang ada di Rencana Kerja (RENJA) ke dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran (KUA PPAS) Tahun 2025.

## 1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pangkalpinang Tahun 2025, meliputi :

Bab I Pendahuluan

Menjelaskan latar belakang dan hubungan antar dokumen, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisannya.

Bab II Hasil Evaluasi Renja Tahun Lalu

Bab ini memuat kajian (reviu) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Akhir perangkat daerah tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (n-1) mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja Perangkat Daerah sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target RENSTRA Perangkat Daerah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pangkalpinang Tahun 2024-2026 berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya, analisis hasil laporan kinerja pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pangkalpinang, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah, serta penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.

Bab III Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Menjelaskan telaahan terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pangkalpinang, program dan kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pangkalpinang tahun 2025 .

Bab IV Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

Menjelaskan Rencana Kerja serta pendanaan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pangkalpinang pada tahun 2025.

Bab V Penutup

Menjelaskan catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah - kaidah pelaksanaan serta rencana tindak lanjut.

# BAB II
# EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENCANA KERJA TAHUN SEBELUMNYA

## 2.1 Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun Sebelumnya dan Capaian Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pangkalpinang

Evaluasi terhadap hasil pelaksanaan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pangkalpinang tahun 2024 dan 2025 serta evaluasi terhadap pencapaian indikator kinerja Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pangkalpinang Tahun 2022 – 2024 yang disajikan dalam bentuk tabel di bawah ini merupakan data/informasi tentang akumulasi realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dalam Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pangkalpinang selama tahun 2023 sampai dengan tahun 2024 dan perkiraan realisasi tahun 2025 (mengacu target pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pangkalpinang Tahun Anggaran 2024) yang kemudian dibandingkan dengan pencapaian akhir yang diharapkan dari penetapan target kinerja dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pangkalpinang Tahun 2024 - 2026. Berdasarkan hasil evaluasi ini dapat diketahui program/kegiatan mana yang tidak memenuhi atau memenuhi dan/atau melebihi persentase pencapaian target kinerja hasil / keluaran yang telah direncanakan.

Dari 1 (satu) urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar yang difungsikan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pangkalpinang yakni urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, pada tahun 2025 ada 5 (lima) Program kerja, dan 11 (sebelas) kegiatan, dan sub kegiatan 23 (dua puluh tiga) yang dilaksanakan dalam rangka implementasi Tujuan dan Sasaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pangkalpinang Tahun 2024 – 2026, namun belum bisa dihitung tingkat capaian realisasi keuangannya. Bila dibandingkan dengan tahun 2024, pelaksanaan program urusan wajib Kependudukan dan Pencatatan Sipil ini mengalami perubahan yang berarti khususnya dalam kualitas, begitupun dalam segi ketersediaan anggaran, dari tahun 2022 – 2025 jumlah pagu anggaran mengalami kenaikan dan penurunan yang berfluktuasi, dan pada tahun 2025 pagu anggaran OPD ditetapkan sebesar Rp 5.226.510.551,- (Lima milyar dua ratus dua puluh enam juta lima ratus sepuluh ribu lima ratus lima puluh satu rupiah). Dari sisi penganggaran APBD mengalami Penurunan sebesar Rp. 860.399.148,- (Delapan ratus enam puluh juta tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu seratus empat puluh delapan rupiah) dari pagu anggaran APBD tahun 2024 yang berjumlah Rp 6.086.909.699,- (Enam milyar delapan puluh enam juta sembilan ratus sembilan ribu enam ratus sembilan puluh sembilan rupiah).

Pada tahun 2024 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pangkalpinang melaksanakan 5 (lima) program,15 (lima belas) kegiatan, dan sub kegiatan 41 dengan masing-masing akan dijelaskan dalam bentuk uraian di bawah ini

1. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD, dengan Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD sebanyak 1 dokumen, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.4.821.100,-
2. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD, dengan Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD1 sebanyak 1 dokumen, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 4.000.000,-
3. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD, dengan Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD sebanyak 1 dokumen, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 5.655.000,-
4. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah sebanyak 1 laporan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 3.000.000,-
5. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, dengan Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN sebanyak 28 Orang, dengan alokasi anggaran Rp 3.246.980.092,-
6. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD, dengan Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD sebanyak 2 laporan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 10.915.500,-
7. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD, dengan Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD sebanyak 1 laporan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 7.148.000
8. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya, dengan Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan sebanyak 1 paket, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 49.700.000
9. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi, dengan Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan sebanyak 10 Pegawai, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 50.000.000
10. Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan, dengan Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan sebanyak 6 orang, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 9.535.000,-
11. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, dengan Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan sebanyak 1 Paket, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 9.541.000
12. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, dengan Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan sebanyak 1 paket, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 9.541.000
13. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga, dengan Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan sebanyak 1 paket dengan alokasi anggaran sebesar Rp 4.541.000
14. Penyediaan Bahan Logistik Kantor, dengan Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan sebanyak 1 paket, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 55.804.000

15. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan, dengan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan sebanyak 2 paket, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 10.000.000
16. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, dengan Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD sebanyak 1 paket, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 110.794.279,-
17. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, dengan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan sebanyak 1 laporan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 163.200.000,-
18. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor, dengan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan sebanyak 1 laporan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 40.000.000
19. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor, dengan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan sebanyak 1 laporan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 1.059.284.928,-
20. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, dengan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya sebanyak 1 uni,t dengan alokasi anggaran sebesar Rp 39.550.000
21. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, dengan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya sebanyak 3 unit, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 70.480.000,-
22. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya, dengan Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi sebanyak 1 unit, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 19.541.000,-
23. Pendataan penduduk non permanen dan rentan administrasi kependudukan, dengan Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan sebanyak 1 dokumen, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 10.000.000
24. Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk, dengan Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk sebanyak 1 dokumen, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 542.545.800,-
25. Penyelesaian Masalah Pendaftaran Penduduk, dengan Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Pelayanan Penyelesaian Masalah Pendaftaran Penduduk sebanyak 400 orang, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 10.000.000
26. Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan, dengan Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia sebanyak 2 dokumen, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 164.168.000

27. Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk, dengan Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk sebanyak 3 dokumen, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 10.000.000
28. Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting, dengan Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting sebanyak 1 dokumen, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 55.000.000,-
29. Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil, dengan Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan sebanyak 1 layanan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 5.000.000,-
30. Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama yang Berkaitan dengan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam, dengan Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama yang Berkaitan dengan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam sebanyak 1 laporan dengan alokasi anggaran sebesar Rp 10.000.000,-
31. Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pencatatan Sipil, dengan Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pencatatan Sipil sebanyak1 laporan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 10.000.000,-
32. Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil, dengan Jumlah Laporan Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil sebanyak 1 laporan dengan alokasi anggaran sebesar Rp 6.150.000,-
33. Fasilitasi Terkait Pencatatan Sipil, dengan Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pencatatan Sipil sebanyak 1 laporan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 6.150.000,-
34. Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan, dengan Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang diolah dan disajikan sebanyak 2 Dokumen, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 10.000.000,-
35. Kerjasama Pemanfaatan Data, dengan Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan sebanyak 26 dokumen, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 7.500.000,-
36. Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Non Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan, dengan Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan sebanyak 2 laporan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 6.364.000,-

37. Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan, dengan Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan sebanyak 3 laporan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 232.000.000,-
38. Sosialisasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan, dengan Jumlah Laporan hasil Sosialisasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan sebanyak 2 laporan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 8.000.000
39. Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat, dengan Jumlah Dokumen Hasil Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat sebanyak 1 dokumen, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 5.000.000,-
40. Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan, dengan Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan sebanyak 1 laporan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 2.000.000,-
41. Penyediaan data kependudukan Kabupaten/Kota dengan alokasi anggaran sebesar Rp 3.000.000,-

Kemudian kami sampaikan kembali bahwa pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2024 atau tahun pertama RENSTRA Perangkat Daerah belum selesai dilaksanakan pada saat penyusunan RENJA Tahun 2024 ini sehingga pencapaian tahun 2024 belum bisa dievaluasi secara menyeluruh. Oleh karena itu rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Rencana Kerja (RENJA) dan pencapaian rencana strategis (RENSTRA) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pangkalpinang dapat disajikan dan digambarkan dalam tabel T-C.29 di bawah ini.

**Tabel T-C.29**

**Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja (RENJA ) Perangkat Daerah dan Pencapaian Rencana Strategis (RENSTRA)**
**Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil s.d. Tahun 2024**

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) | Target Kinerja Capaian Program RENSTRA Tahun 2025 | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022 (n-3) | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2023 (n-2) | | | Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah tahun 2024 (n-1) | Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Tahun Berjalan | | Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Tahun Berjalan | OPD Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 (n-2) | Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023 (n-2) | Tingkat Realisasi (%) | | Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) | Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=(7/6) | 9 | 10=(5+7+9) | 11=(10/4) | **12** | **13** |
| | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | | | | | | | | | | | **DISDUKCAPIL** |
| | | **Persentase Laporan Kinerja keuangan yang disampaikan tepat waktu** | | **100%** | **100%** | **100%** | **100%** | | - | - | | |
| | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinera Perangkat Daerah** | **Persentase Penyampaian Dokumen Perencanaan, penganggaran dan kinerja perangkat daerah tepat waktu** | **100%** | **100%** | **100%** | **100%** | **100%** | **100%** | **100%** | **100%** | | |
| | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 2 Dokumen | - | - | - | - | 2 Dokumen | - | - | | |
| | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan hasil koordinasi dan Penyusunan Dokumen Anggaran | 1 Laporan | - | - | - | - | 1 Laporan | - | - | | |

| Kode | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) | Target Kinerja Capaian Program RENSTRA Tahun 2025 | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022 (n-3) | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2023 (n-2) | | | Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah tahun 2024 (n-1) | Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Tahun Berjalan | | Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Tahun Berjalan | OPD Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 (n-2) | Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023 (n-2) | Tingkat Realisasi (%) | | Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) | Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) | | |
| 1 | | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=(7/6) | 9 | 10=(5+7+9) | 11=(10/4) | **12** | **13** |
| | | | | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 1 Dokumen | - | - | - | - | 1 Dokumen | - | - | | **DISDUKCAPIL** |
| | | | | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | 1 Dokumen | - | - | - | - | 1 Dokumen | - | - | | |
| | | | | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | 1 dokumen | - | - | - | - | 1 dokumen | - | - | | |
| | | | | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 2 Laporan | - | - | - | - | 2 Laporan | - | - | | |
| | | | | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja | 1 Laporan | - | - | | - | 1 Laporan | - | - | | |
| | | | | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | **Persentase Tersusunnya Laporan Keuangan Perangkat daerah sesuai SAP** | 100% | 100% | 100 % | 100% | 100% | 100% | 100 % | 100% | | |

| Kode | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) | Target Kinerja Capaian Program RENSTRA Tahun 2025 | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022 (n-3) | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2023 (n-2) | | | Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah tahun 2024 (n-1) | Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Tahun Berjalan | | Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Tahun Berjalan | OPD Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 (n-2) | Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023 (n-2) | Tingkat Realisasi (%) | | Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) | Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) | | |
| 1 | | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=(7/6) | 9 | 10=(5+7+9) | 11=(10/4) | **12** | **13** |
| | | | | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah ASN yang menerima gaji dan tunjangan | 28 Orang | 28 Orang | 28 Orang | 28 Orang | 100% | 28 Orang | - | - | | |
| | | | | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Jumlah Laporan keuangan akhir tahun SKPD dan Laporan hasil koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun | 2 Laporan | - | - | - | - | 2 Laporan | - | - | | |
| | | | | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/triwulan/Semesteran SKPD | Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/triwulan/Semesteran SKPD | 1 Laporan | - | - | - | - | 1 Laporan | - | - | | |
| | | | | | **Persentase ASN yang memenuhi standar kompetensi/kualifikasi pada unit kerjanya** | | - | 100 % | 78,57 % | 78,57% | | - | - | | |
| | | | | **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** | **Persentase Penurunan Tingkat Pelanggaran Disiplin ASN** | 100% | - | - | - | - | 100% | - | - | | |
| | | | | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | Jumlah paket pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya | 1 Paket | - | 71 paket | 71 paket | 100% | 1 Paket | - | - | | |
| Kode | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) | Target Kinerja Capaian | Realisasi Target Kinerja | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2023 (n-2) | | | Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat | Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Tahun Berjalan | | Perkiraan Realisasi Capaian | OPD Penang |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Program RENSTRA Tahun 2025 | Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022 (n-3) | Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 (n-2) | Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023(n-2) | Tingkat Realisasi (%) | Daerah tahun 2024 (n-1) | Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) | Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) | Target Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Tahun Berjalan | gungja wab |
| 1 | | | | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=(7/6) | 9 | 10=(5+7+9) | 11=(10/4) | **12** | **13** |
| | | | | Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | | | - | - | - | - | | - | - | | |
| | | | | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkann Tugas dan Fungsi | Jumlah pegawai Berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan | | 10 Orang | - | - | - | - | 10 Orang | - | - | | |
| | | | | Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan | Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi peraturan Perundang-undangan | | 6 Orang | - | - | - | - | 6 Orang | - | - | | |
| | | | | | Persentase terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran | | | 100% | 100 % | 71,42 % | 71,42% | | - | - | | |
| | | | | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | **Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah** | | 100% | - | 5 Laporan | 5 Laporan | 100% | 100% | - | - | | |
| | | | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia | | 1 Paket | 14 paket | 1 paket | 1 paket | 100% | 1 Paket | 100% | 100% | | |
| | | | | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Jumlah paket peralatan rumah tangga yang tersedia | | 1 Paket | **36 set** | 1 paket | 1 paket | 100% | 1 Paket | - | - | | |
| | | | | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan | | 1 Paket | 47 jenis | 2 paket | 2 paket | 100% | 1 Paket | - | - | | |
| | | | | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | jumlah paket barang cetakan dan penggadaan yang disediakan | | 2 Paket | 12 set | 2 paket | 2 paket | 100% | 2 Paket | - | - | | |

| kode | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) | Target Kinerja Capaian Program RENSTRA Tahun 2024 | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022 (n-3) | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2023 (n-2) | | | Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah tahun 2024 (n-1) | Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Tahun Berjalan | | Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Tahun Berjalan | OPD Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 (n-2) | Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023 (n-2) | Tingkat Realisasi (%) | | Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) | Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) | | |
| 1 | | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=(7/6) | 9 | 10=(5+7+9) | 11=(10/4) | **12** | **13** |
| | | | | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan peundang-undangan | | | - | - | - | | - | - | | |
| | | | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD | 1 Laporan | 33 Orang | 1 laporan | 1 laporan | 100% | 1 Laporan | - | - | | |
| | | | | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada SKPD | 1 Laporan | - | - | - | - | 1 Laporan | - | - | | |
| | | | | | Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam Kondisi Baik | | 100% | 100 % | 83,06 % | 83,06% | | - | - | | |
| | | | | **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | **Persentase pengadaan barang milik daerah** | 100% | - | 2 Laporan | 2 Laporan | 100% | 100% | - | - | | |
| | | | | Pengadaan Mebel | Jumlah paket mebel yang disediakan | 5 unit | - | 28 unit | 28 unit | 100% | 3 unit | - | - | | |

| Kode | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) | Target Kinerja Capaian Program RENSTRA Tahun 2025 | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022 (n-3) | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2023 (n-2) | | | Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah tahun 2024 (n-1) | Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Tahun Berjalan | | Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Tahun Berjalan | OPD Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 (n-2) | Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023 (n-2) | Tingkat Realisasi (%) | | Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) | Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) | | |
| 1 | | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=(7/6) | 9 | 10=(5+7+9) | 11=(10/4) | **12** | **13** |
| | | | | Pengadaan sarana dan prasarana Pendukung gedung kantor/bangunan lainnya | Jumlah unit sarana dan prasarana pendukung gedun kantor/banggunan lainnya yang disediakan | - | 3 Unit | 15 Unit | 15 Unit | 100% | - | - | - | | |
| | | | | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan | 3 unit | - | - | - | - | 3 unit | - | - | | **DISDUKCAPIL** |
| | | | | Pengadaan Aset Tak Berwujud | Jumlah unit aset tak Berwujud yang disediakan | 1 Unit | - | - | - | - | 1 Unit | - | - | | |
| | | | | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | **Persentase Terlaksananya Jasa penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | 100% | 100 % | 3 Laporan | 3 Laporan | 100% | 100% | 100 % | 100% | | |
| | | | | Penyedia Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan Listrik | Jumlah laporan penyedia jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik. | 1 Laporan | 2 Laporan | 2 Laporan | 2 Laporan | 100% | 1 Laporan | 100 % | - | | |
| | | | | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan | 1 Laporan | 1 laporan | 1 laporan | 1 laporan | 100% | 1 Laporan | 100 %- | - | | |
| | | | | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah laporan penyeiaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan | 1 Laporan | 43 orang | 2 laporan | 2 laporan | 100% | 1 Laporan | - | - | | |

| Kode | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) | Target Kinerja Capaian Program RENSTRA Tahun 2025 | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022 (n-3) | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2023 (n-2) | | | Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah tahun 2024 (n-1) | Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Tahun Berjalan | | Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Tahun Berjalan | OPD Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 (n-2) | Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023(n-2) | Tingkat Realisasi (%) | | Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) | Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) | | |
| 1 | | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=(7/6) | 9 | 10=(5+7+9) | 11=(10/4) | **12** | **13** |
| | | | | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | **Persentase Barang Milik Perangkat Daerah dalam Kondisi Baik** | 100% | 100% | 2 Laporan | 2 Laporan | 100% | 100% | - | - | | |
| | | | | Penyediaan Jasa Pemeliharan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah kendaraan perorangan/dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya | 1 unit | 3 Unit | 3 unit | 3 Unit | 100% | 1 unit | 100% | - | | **DISDUKCAPIL** |
| | | | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 3 Unit | - | - | - | - | 2 Unit | - | - | | |
| | | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah gedung/bangunan lainnya yang dipelihara/direhab | 1 unit | 1 Unit | 1 unit | 1 Unit | 100% | 1 unit | 100% | - | | |
| | | | | Pemeliharaan/rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 1 unit | - | - | - | - | 1 unit | - | - | | |
| | | | | **PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK** | | | | - | - | - | | - | - | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Rasio Penduduk ber KTP persatuan Penduduk | | 690 | 690 N/A | 984 N/A | 100% | | - | - | | |
| | | | | | Penerapan KTP Nasional Berbasis NIK | | 100% | 99,7% | 100 % | 100% | | - | - | | DISDUKCAPIL |
| | | | | | Cakupan kepemilikan Kartu Keluarga | 97% | 99,79 | 97% | 99,94% | 103% | 97% | 98,91% | 102% | | |
| | | | | | Perekaman KTp elektronik | 99,4% | 97,67 | 99% | 98,42% | 99,41% | 99,4% | 98,50% | 99,09% | | |
| | | | | | Cakupan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP) | | 97,67 | 99,6% | 98,42% | 98,82% | | | | | |
| | | | | | Persentase anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA | 70% | 70 | 75% | 73,04% | 97,39% | 70% | 71,01% | 101% | | |
| | | | | **Pelayanan Pendaftaran Penduduk** | Persentase pelayanan penduduk yang dilakukan | 100% | 2 jenis | 3 Laporan | 3 Laporan | 100% | 100% | - | - | | |
| | | | | Pencatatan , Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk | Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk | 1 dokumen | 2 jenis | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 100% | 1 dokumen | - | - | | |
| | | | | Penyelesian Masalah Pendaftaran Penduduk | Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Pelayanan Penyelesaian Masalah Pendaftaran Penduduk | 400 Orang | - | 500 orang | 500 orang | 100% | 400 | - | - | | |
| | | | | Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Aministrasi Kependudukan | Jumlah Dokumen hasil Pendataan penduduk non permanen dan /rentan Administrasi kependudukan | 1 Dokumen | - | 1.230 dokumen | 1.230 dokumen | 100% | 1 Dokumen | - | - | | |
| | | | | **Penataan Pendaftaran Penduduk** | **Persentase ketersediaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan** | 2 Dokumen | - | 1 laporan | 1 laporan | 100% | 2 Dokumen | - | - | | |
| | | | | Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blanko KTP-El, formulir, dan Buku terkait Pendaftaran Penduduk sesuai dengan | Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blanko KTP-El, formulir, dan Buku terkait Pendaftaran Penduduk sesuai dengan | 2 Dokumen | - | 1 dokumen | - | - | 2 Dokumen | - | - | | |

| | | | | Kebutuhan | Kebutuhan yang tersedia | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kode | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) | Target Kinerja Capaian Program RENSTRA Tahun 2025 | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022 (n-3) | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2023 (n-2) | | | Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah tahun 2024 (n-1) | Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Tahun Berjalan | | Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Tahun Berjalan | OPD Penanggungjawab |
| | | | | | | | | Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 (n-2) | Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023 (n-2) | Tingkat Realisasi (%) | | Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) | Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) | | |
| 1 | | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=(7/6) | 9 | 10=(5+7+9) | 11=(10/4) | **12** | **13** |
| | | | | **Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk** | **Persentase Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk** | 72% | - | - | - | - | 70% | - | - | | |
| | | | | Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk | Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran | 3 Dokumen | - | - | | - | 3 Dokumen | - | - | | |
| | | | | Sosialisasi Pendaftaran Penduduk | Jumlah Laporan Hasil Sosialiasi Pendaftaran | 4 laporan | - | - | | - | 4 laporan | - | - | | |
| | | | | **Program Pencatatan Sipil** | | | - | - | | - | | - | - | | |
| | | | | | Rasio Bayi berakte kelahiran per 1000 penduduk | 930 | 991 | 920 N/A | 998% | 108 | 925 | 97,13% | 104% | | |
| | | | | | Kepemilikan akte kelahiran | - | 56,78 | 92% | 58,26% | 63,33% | - | - | - | | |
| | | | | | Persentase anak (0-18) tahun yang memiliki akta kelahiran | | 97,25% | 95% | 98,43% | 104% | - | - | - | | |

| kode | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) | Target Kinerja Capaian Program RENSTRA Tahun 2025 | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022 (n-3) | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2023 (n-2) | | | Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah tahun 2024 (n-1) | Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Tahun Berjalan | | Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Tahun Berjalan | OPD Penanggung jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 (n-2) | Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023 (n-2) | Tingkat Realisasi (%) | | Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) | Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) | | |
| 1 | | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=(7/6) | 9 | 10=(5+7+9) | 11=(10/4) | **12** | **13** |
| | | | | | Peningkatan cakupan akta kelahiran yang diterbitkan | | 13,65% | 4 N/A | 2,61% | 62,25% | | - | - | | |
| | | | | | Proporsi anak umur di bawah 5 tahun yang kelahirannya dicatat oleh lembaga pencatatan sipil, menurut umur | | 99,52% | 89% | 99,66% | 112% | | - | - | | |
| | | | | | Rasio perkawinan yang tercatat di catatan sipil per 1000 penduduk | | 688‰ | 780 ‰ | 736‰ | 94,36% | | - | - | | |
| | | | | | Peningkatan cakupan kepemilikan buku nikah/akta perkawinan pada semua pasangan | | 68,87% | 68% | 73,57% | 108 | | - | | | |
| | | | | | Peningkatan cakupan kepemilikan akta perceraian dari semua individu yang perceraiannya tercatat | | 70,95 | 75% | 73,92 | 98,56% | | - | - | | |
| | | | | | Cakupan Kepemilikan Akte kematian | | 100 | 35% | 100% | 286% | - | - | - | | |
| | | | | | Kepemilikan akta kelahiran | 98,5% | - | - | - | - | 99% | - | | | |
| | | | | **Pelayanan Pencatatan Sipil** | **Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Pencatatan** | | 100% | 1 laporan | 1 laporan | 100% | | - | - | | |
| | | | | Peningkatan Dalam Pelayanan Pencatatan Sipil | Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan | 1 Layanan | - | - | - | - | 1 Layanan | - | - | | |
| | | | | Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa | Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan,Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen | 1 Dokumen | 2 jenis | 1 dokumen | 1 dokumen | 100% | 1 Dokumen | - | - | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Penting | Atas Pelaporan Peristiwa Penting | | | | | | | | |
| kode | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) | Target Kinerja Capaian Program RENSTRA Tahun 2025 | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022 (n-3) | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2023 (n-2) | | | Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah tahun 2024 (n-1) | Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Tahun Berjalan | | Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Tahun Berjalan | OPD Penanggung jawab |
| | | | | | | | | Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 (n-2) | Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023 (n-2) | Tingkat Realisasi (%) | | Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) | Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) | | |
| 1 | | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=(7/6) | 9 | 10=(5+7+9) | 11=(10/4) | **12** | **13** |
| | | | | **Penyelenggaraan Pencatatan Sipil** | **Persentas Penerbitan Akta Perkawinan** | 67,8% | - | - | | - | 66,2% | - | - | | |
| | | | | | **Persentase Penerbitan Akta Perceraian** | 69,5% | - | - | | - | 66% | - | - | | |
| | | | | | **Persentase Penerbitan Akta Kematian** | 100% | - | - | | - | 100% | - | - | | |
| | | | | | **Jumlah pelaksanaan kegiatan pencatatan Sipil** | | 100% | 2 laporan | 2 laporan | 100% | | - | - | | |
| | | | | Koordinasi dengan Kantor Kementrian yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupatten/Kota dan Pengadilan Agama yang Berkaitan dengan Pencatatan Nikah, Talak, cerai, dan Rujuk Bagi Penduduk yang Beragama Islam | Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama yang Berkaitan dengan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam | 1 laporan | 100 orang | - | - | - | 1 laporan | - | - | | |
| | | | | Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan | Jumlah Laporan Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa | 1 Laporan | 100 data | 1 lapoan | 1 lapoan | 100% | 1 Laporan | - | - | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil | Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil | | | | | | | | |
| kode | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) | Target Kinerja Capaian Program RENSTRA Tahun 2025 | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022 (n-3) | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2023 (n-2) | | | Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah tahun 2024 (n-1) | Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Tahun Berjalan | | Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Tahun Berjalan | OPD Penanggung jawab |
| | | | | | | | | Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 (n-2) | Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023 (n-2) | Tingkat Realisasi (%) | | Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) | Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) | | |
| 1 | | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=(7/6) | 9 | 10=(5+7+9) | 11=(10/4) | **12** | **13** |
| | | | | Fasilitasi Terkait Pencatatan Sipil | Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pencatatan Sipil | 1 Laporan | | - | | - | 1 Laporan | - | - | | |
| | | | | Sosialisasi Terkait Pencatatan Sipil | Jumlah Laporan Hasil sosialisasi Pencatatan Sipil | 1 laporan | | - | | - | 1 laporan | - | - | | |
| | | | | **PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN** | Persentase jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama | 84,84% | 60,60 | 2,8 % | 60,60% | 100% | 78,79% | 66,66% | 78,57% | | |
| | | | | **Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian database Kependudukan** | **Persentase Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan Data dan Penyajian Database kependudukan** | 96% | 1 jenis | 1 laporan | 1 laporan | 100% | 95% | - | - | | |
| | | | | Pengelolaan dan penyajian data Kependudukan | Jumlah dokumen data yang diolah dan disajikan | 2 Dokumen | 1 jenis | 1 dokumen | 1 dokumen | 100% | 2 Dokumen | - | | | |
| | | | | Kerjasama Pemanfaatan Database Kependudukan | Jumlah dokumen kerjasama kpemanfaatan database kependudukan | 28 Dokumen | - | - | | - | 26 Dokumen | - | - | | |
| | | | | **Penyelengaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan** | **Persentase Penyelenggaraan Pengelolaan Inforamasi Administrasi** | 80% | 1 kegiatan | 2 laporan | 2 laporan | 100% | 70% | - | - | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | **Kependudukan** | | | | | | | | | |
| kode | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) | Target Kinerja Capaian Program RENSTRA Tahun 2024 | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021 (n-3) | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2023 (n-2) | | | Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah tahun 2023 (n-1) | Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Tahun Berjalan | | Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Tahun Berjalan | OPD Penanggung jawab |
| | | | | | | | | Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 (n-2) | Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-2) | Tingkat Realisasi (%) | | Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) | Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) | | |
| 1 | | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=(7/6) | 9 | 10=(5+7+9) | 11=(10/4) | **12** | **13** |
| | | | | Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Non Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan | Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan | 2 Laporan | | 1 laporan | 1 laporan | 100% | 2 Laporan | - | - | | |
| | | | | Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan | Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan | 3 laporan | 3 laporan | 1 laporan | 1 laporan | 100% | 3 laporan | - | - | | |
| | | | | Sosialisasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan | Jumlah Laporan hasil Sosialisasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan | 2 Laporan | - | - | | - | 2 Laporan | - | - | | |
| | | | | Penyajian Data Kependudukan yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan | Jumlah data yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan | 2 Dokumen | - | - | - | - | 2 Dokumen | - | - | | |
| | | | | Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat | Jumlah Dokumen Hasil Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat | 2 Dokumen | - | - | - | - | 2 Dokumen | - | - | | |

| kode | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) | Target Kinerja Capaian Program RENSTRA Tahun 2025 | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022 (n-3) | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2023 (n-2) | | | Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah tahun 2024 (n-1) | Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Tahun Berjalan | | Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Tahun Berjalan | OPD Penanggung jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 (n-2) | Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023 (n-2) | Tingkat Realisasi (%) | | Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) | Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) | | |
| 1 | | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=(7/6) | 9 | 10=(5+7+9) | 11=(10/4) | **12** | **13** |
| | | | | **Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan** | **Persentase Pembinaan dan Pengawasan terkait informasi administrasi kependudukan** | 80% | - | - | - | - | 70% | - | - | | |
| | | | | Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan | Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan | 1 Laporan | - | - | - | - | 1 Laporan | - | - | | |
| | | | | **PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN** | Persentase keserasian database kependudukan | | 97,31% | 97% | - | - | | - | - | | |
| | | | | | Persentase tersajinya data kependudukan yang akurat | | 100% | 50% | 100% | 200% | | - | - | | |
| | | | | | **Persentase keserasian dan akurasi database kependudukan** | 80% | - | - | - | - | 70% | - | - | | |
| | | | | **Penyusunan Profil kependudukan** | Jumlah Laporan Profil Kependudukan | | - | 1 laporan | 1 laporan | 100% | | | | | |
| | | | | Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Data Kependudukan Kabupaten/Kota | 2 Dokumen | - | - | - | - | 2 dokumen | | | | |
| | | | | Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta kebutuhan yang lain | Jumlah Dokumen profil perkembangan penduduk kota pangkalpinang | | - | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 100% | | | | | |

**2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pangkalpinang**

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah pada Pasal 15 Ayat (4) huruf q dan r, disebutkan bahwa urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan salah satu urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar pemerintahan yang harus masuk dalam program prioritas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Di dalam RPD Kota Pangkalpinang Tahun 2024 – 2026, kedua urusan ini sudah masuk baik dalam perencanaan maupun pelaporan hasil evaluasi penyelenggaraan pemerintahan dan dalam RKPD dan APBD Kota Pangkalpinang tahun berkenaan program dan kegiatan urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil secara rutin dianggarkan dan dilaksanakan. Atas perencanaan dan pelaksanaan seluruh program dan kegiatan tersebut untuk memenuhi ketentuan yang berlaku harus dilakukan analisis terhadap pencapaian kinerja hasil dan keluaran dari masing-masing program dan kegiatan yang didasarkan pada tolak ukur / indikator kinerja kuncinya.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pangkalpinang berdasarkan Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 50 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unsur Pelaksana Teknis Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang kependudukan dan pencatatan sipil yang menjadi kewenangan daerah.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pangkalpinang telah melaksanakan penilaian kinerja dengan mengacu pada Perjanjian Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pangkalpinang Tahun 2025 yang telah disepakati. Penilaian ini dilakukan untuk mengevaluasi dan mengukur dalam rangka pengumpulan data kinerja yang hasilnya memberikan gambaran keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran.

Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh Kota Pangkalpinang dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Indikator kinerja sebagai tolak ukur keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pangkalpinang beserta target capaian realisasinya dirinci seperti dijelaskan sebagai berikut:

**Tabel 2.2**
**CAPAIAN KINERJA SASARAN STRATEGIS TAHUN 2023**

| No | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | SATUAN | TARGET | REALISASI |
|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | |
| 1 | Meningkatkan Rata-Rata Lama Pengurusan Dokumen Kependudukan | Rata-rata Lama Pengurusan Dokumen kependudukan | Hari | 7 | 3 |
| | | 1. Rasio penduduk ber KTP persatuan Penduduk. | N/A | 690 | 984 |
| | | 2. Cakupan Kepemilikan Kartu Keluarga | N/A | 97 | 99,94 |
| | | 3. Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP) | % | 99,6 | 98,42 |
| | | 4. Perekaman KTP Elektronik | % | 99 | 98,42 |
| | | 5. Persentase anak usia 0-17 tahun Kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA | % | 75 | 73,04 |
| | | 6. Penerapan KTP Nasional Berbasis NIK | % | 99,7 | 100 |
| | | 7. Rasio Bayi Berakte Kelahiran Per 1000 Penduduk | N/A | 920 | 998 |
| | | 8. Kepemilikan Akte kelahiran | % | 92 | 58,26 |
| | | 9. Rasio Perkawinan yang Tercatat di Catatan Sipil Per 1000 Penduduk | N/A | 780 | 736 |
| | | 10. Cakupan Kepemilikan Akte Kematian | % | 35 | 100 |
| | | 11. Peningkatan Cakupan akta kelahiran yang diterbitkan | N/A | 4 | 2,61 |
| | | 12. Persentase anak (0-18) tahun yang memiliki akta kelahiran | % | 95 | 98,43 |
| | | 13. Peningkatan Cakupan Kepemilikan Buku nikah/ akta perkawinan pada semua pasangan | % | 68 | 73,57 |
| | | 14. Peningkatan Cakupan kepemilikan akta perceraian dari semua individu yang perceraiannya tercatat | % | 75 | 73,92 |
| | | 15. Proporsi anak umur di bawah 5 tahun yang tercatat kelahirannya oleh lembaga pencatatan sipil, menurut umur | % | 89 | 99,66 |
| | | 16.Persentase Jumlah OPD yang telah Memanfaatkan data Kependudukan berdasarkan Perjanjian Kerja | % | 2,8 | 60,60 |
| | | 17. Persentase keserasian database kependudukan | % | 97 | |
| | | 18. Persentase tersajinya data Kependudukan yang Akurat | % | 50 | 100 |

Dari penjelasan atas terdapat 1 (Satu) sasaran strategis yang terbagi ke dalam 1 (Satu) indikator sasaran strategis. Dengan Sistem SIAK Terpusat Terbaru Daerah hanya sebagai user dan tidak diberikan kewenangan untuk mengolah database kependudukkan sehingga ada beberapa data yang dapat diperoleh dan sebagian data tidak dapat diperoleh. Pada Tahun 2023, secara umum berdasarkan target yang telah ditetapkan hasilnya sudah mencapai target, tetapi secara kualitas pada beberapa Indikator Kinerja masih harus ditingkatkan akuntabilitas dan kevalidan data yang dituangkan untuk memperoleh hasil target indikatornya. Hal ini dikarenakan ketersediaan data pendukung, SDM pengolah dan kemampuan untuk menjelaskan beberapa hal terkait faktor keberhasilan dan hambatan kurang. Oleh sebab itu peningkatan kemampuan SDM sangat diperlukan guna mendukung penyempurnaan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang lebih baik dan dapat dipertanggungjawabkan kebenaran datanya.

Memenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 Pasal 28 Ayat (2) mengenai sistem pengukuran kinerja yang mencakup Indikator Kinerja Kunci, teknik pengumpulan data kinerja, metodologi pengukuran kinerja serta analisis, pembobotan, dan interpretasi kinerja, maka berikut ini kami sajikan analisis pencapaian kinerja pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pangkalpinang yang digambarkan dalam bentuk tabel di bawah ini

**Tabel T-C.30**

**Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pangkalpinang**

| NO | Indikator | SPM / Standar Nasional | IKK | Target Renstra Perangkat Daerah | | | | | Realisasi Capaian | | | Proyeksi | | Catatan Analisis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Tahun 2019 | Tahun 2020 | Tahun 2021 | Tahun 2022 | Tahun 2023 | Tahun 2021 | Tahun 2022 | Tahun 2023 | Tahun 2024 | Tahun 2025 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | Meningkatkan **Cakupan** Kepemilikan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil | --- | --- | | | | | | | | | 78,2 | **78,85** | |
| **2** | **Meningkatnya Rata-rata Lama Pengurusan Dokumen** | **---** | **---** | | | **7** | **7** | **7** | **3** | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| | Resio Penduduk berKTP **persatuan penduduk** | **---** | **---** | **1045** | **1047** | **650** | **670** | **690** | **682** | **690** | 984 | 99,4 | 99,5 | |
| | Cakupan Kememilikan Kartu Keluarga | --- | --- | 100 | 100 | 95 | 96 | 97 | 96,84 | 99,79 | 99,94 | 97 | 97,3 | |
| | Cakupan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk | --- | --- | 99,1 | 99,3 | 99,1 | 99,6 | 99,6 | 99,08 | 97,67 | 98,42 | - | - | |
| | Penerapan KTP Nasional Berbasis NIK | --- | --- | 100 | 100 | 99,2 | 99,5 | 99,7 | 100 | 100 | 100 | - | - | |
| | Perekaman KTP Elektronik | --- | --- | | | 97 | 98 | 99 | 99,08 | 97,67 | 98,42 | - | - | |
| | Persentase anak usia 0-17 tahun Kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA | --- | --- | | | 65 | 70 | 75 | 68,29 | 70 | 73,04 | 70 | 73 | |

| NO | Indikator | SPM / Standar Nasional | IKK | Target Renstra Perangkat Daerah | | | | | Realisasi Capaian | | | Proyeksi | | Catatan Analisis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Tahun 2019 | Tahun 2020 | Tahun 2021 | Tahun 2022 | Tahun 2023 | Tahun 2021 | Tahun 2022 | Tahun 2023 | Tahun 2024 | Tahun 2025 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 | 10 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | Rasio Bayi Berakte Kelahiran per1000 penduduk | --- | --- | 850 | 870 | 890 | 920 | 920 | 991 | - | 998 | - | - | |
| | Cakupan Kepemilikan Akte Kelahiran | --- | --- | 80 | 84 | 84 | 88 | 92 | 49,69 | 56,78 | 58,26 | - | - | |
| | Rasio Perkawinan yang tercatat di catatan sipil per 1000 penduduk | --- | --- | 710 | 750 | 750 | 765 | 780 | 631 | 688 | 736 | - | - | |
| | Cakupan Kepemilikan Akte Kematian | --- | --- | 25 | 28 | 28 | 31 | 35 | 100 | 100 | 100 | - | - | |
| | Peningkatan Cakupan akta kelahiran yang diterbitkan | --- | --- | | | 2,7 | 3,5 | 4 | 6,01 | 13,65 | 2,61 | - | - | |
| | Persentase anak (0-18) tahun yang memiliki akta kelahiran | --- | --- | | | 87 | 92 | 95 | 95,36 | 97,25 | 98,43 | 96,5 | 98,5 | |
| | Peningkatan Cakupan Kepemilikan Buku nikah/ akta perkawinan pada semua pasangan | --- | --- | | | 61 | 65 | 68 | 63,13 | 68,87 | 73,57 | - | - | |
| | Peningkatan Cakupan kepemilikan akta perceraian dari semua individu yang perceraiannya tercatat | --- | --- | | | 65 | 72 | 75 | 53,39 | 70,95 | 73,92 | - | - | |
| | Proporsi anak umur di bawah 5 tahun yang tercatat kelahirannya oleh lembaga pencatatan sipil, menurut umur | --- | --- | | | 87 | 88 | 89 | 99,06 | 99,52 | 99,66 | - | - | |
| | Persentase Jumlah OPD yang telah Memanfaatkan data Kependudukan berdasarkan Perjanjian Kerja | --- | --- | | | 1,4 | 2,1 | 2,8 | 20,59 | 60,60 | 60,60 | 84,84 | 90,9 | |
| | Persentase keserasian database kependudukan | --- | --- | 94 | 95 | 95 | 96 | 97 | 98,4 | 97,31 | - | 90 | 100 | |
| | Persentase tersajinya data Kependudukan yang Akurat | --- | --- | | | 50 | 50 | 50 | 100 | 100 | 100 | - | - | |

Dari uraian indikator kinerja dalam kolom indikator pada tabel di atas, dapat dijelaskan bahwa pencantuman indikator output/keluaran kegiatan sebanyak 2 (Dua) jenis pengukuran kinerja tersebut merupakan indikator kinerja perangkat daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024-2026 daerah yang didasarkan pada visi misi RPJPD Kota Pangkalpinang Tahun 2007-2026. dan RENSTRA Perangkat Daerah Tahun 2024-2026. Kemudian indikator kinerja tersebut dibuat berdasarkan pencapaian sasaran kinerja dari setiap urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang bisa diukur realisasi fisiknya seperti Persentase Perekaman Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik, Cakupan Kepemilikan Kartu keluarga, maupun rasio perbandingan, dan lain sebagainya yang dikaitkan dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pangkalpinang sebagai lembaga teknis penyedia layanan publik urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.

Kedua indikator kinerja perangkat daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024-2026 ini merupakan bagian dari Indikator Kinerja Kunci (IKK) baik untuk urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil berdasarkan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Akhir Pemerintah Daerah, yang dapat diuraikan sebagai berikut :

1 Persentase Perekaman Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik
2 Persentase Anak Usia 0-17 Tahun Kurang 1 (satu) Hari yang memiliki KIA
3 Cakupan kepemilikan Kartu Keluarga (KK)
4 Kepemilikan Akta Kelahiran
5 Persentase Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerjasama
6 Persentase keserasian dan akurasi database kependudukan

Berdasarkan realisasi pencapaian indikator keluaran kegiatan (output) pada tabel di atas, dapat dilihat bahwa Capaian Kinerja Tahun 2023 secara umum berdasarkan target yang telah ditetapkan hasilnya sudah mencapai target, tetapi secara kualitas pada beberapa Indikator Kinerja masih harus ditingkatkan akuntabilitas dan kevalidan data yang dituangkan untuk memperoleh hasil target indikatornya. Hal ini dikarenakan ketersediaan data pendukung, SDM pengolah dan kemampuan untuk menjelaskan beberapa hal terkait faktor keberhasilan dan hambatan kurang. Oleh sebab itu peningkatan kemampuan SDM sangat diperlukan guna mendukung penyempurnaan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang lebih baik dan dapat dipertanggungjawabkan kebenaran. Dari seluruh program yang telah ditetapkan berdasarkan Renja 2025 seluruhnya dilaksanakan oleh perangkat daerah. Selain itu dapat dijabarkan bahwa minimnya alokasi anggaran untuk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pangkalpinang

pada tahun 2022 dan 2023 berpengaruh langsung terhadap pencapaian hasil Indikator Kinerja Kunci (IKK) untuk urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD).

## 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pangkalpinang

Menindaklanjuti Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 atas Perubahan Peraturan Pemerintah No 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah maka telah ditetapkan Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 72 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang. Berdasarkan peraturan tersebut merupakan Dinas tipe B yang merupakan unsur pelaksana teknis daerah urusan administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil dimana Kepala Dinas membawahi Sekretaris dan 3 (tiga) Kepala Bidang yaitu Bidang Pendaftaran Penduduk, Bidang Pencatatan Sipil dan Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan. Dengan perubahan struktur organisasi tersebut diharapkan terjadi peningkatan kinerja pada masing-masing program/ kegiatan. Akan tetapi dengan terjadinya perubahan struktur organisasi tersebut maka dibutuhkan peningkatan sarana dan prasarana baik secara kuantitas maupun secara kualitas untuk menunjang kinerja dan program-program kegiatan di tahun 2025. Begitu juga terjadi peningkatan jumlah kebutuhan SDM untuk pencapaian kinerja sesuai dengan target yang diharapkan. Sampai dengan tahun 2025, diprediksikan pencapaian tingkat kinerja pelayanan perangkat daerah dalam memenuhi tugas pokok dan fungsinya sebagai lembaga teknis yang mendukung penyelenggaraan pemerintahan di bidang Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, secara keseluruhan akan mencapai target perkiraan yang ditetapkan dalam RPD Kota Pangkalpinang Tahun 2024 – 2026. Namun sejalan dengan tercapainya tujuan dan sasaran serta realisasi program dan kegiatan tersebut, ada beberapa permasalahan dan hambatan yang timbul seiring dengan proses dan waktu pelaksanaannya.

Permasalahan dan hambatan yang timbul/terjadi dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pangkalpinang sampai saat ini masih merupakan masalah substansial yang berkaitan dengan formasi sumber daya manusia baik dalam kuantitas maupun kualitas, ketersediaan sarana dan prasarana pendukung pelayanan publik yang belum memenuhi standar nasional serta ketersediaan anggaran yang juga belum mendukung pelaksanaan program dan kegiatan teknis secara optimal, sehingga memberi kesan perencanaan dan pelaksanaan keseluruhan kegiatan dilakukan seadanya sama seperti tahun-tahun sebelumnya.

Dampak timbulnya permasalahan dan hambatan tersebut terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah serta terhadap capaian program nasional/internasional (seperti Standar Pelayanan Masyarakat dan Millenium Development Goals) sebenarnya sangat mempengaruhi karena program dan kegiatan dari kedua urusan pemerintahan ini sudah masuk dalam program prioritas RPJP maupun RPJMD Kota Pangkalpinang. Bahkan dalam pembahasan/hasil evaluasi DPRD Kota Pangkalpinang terhadap laporan/bahan pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang dilaksanakan selama 5 (lima) tahun kepemimpinan

Walikota Pangkalpinang, kedua urusan ini sudah masuk dalam kategori / aspek pelayanan umum maupun pelayanan penunjang. Dan secara makro, permasalahan dan hambatan yang substansial tersebut sangat berpengaruh terhadap hasil perencanaan awal dan pencapaian target kinerja yang ingin diwujudkan seperti yang tercantum dalam RENSTRA Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pangkalpinang Tahun 2024 - 2026.

Permasalahan-permasalahan tersebut akan dituangkan dalam bentuk isu-isu strategis yang akan dihadapi dan diselesaikan seiring dengan telah ditetapkannya program dan kegiatan kedua urusan tersebut dalam RPD Kota Pangkalpinang Tahun 2024– 2026 sebagai program / kegiatan prioritas pembangunan daerah. Untuk pengusulan program dan kegiatan OPD harus berpedoman pada RPD Kota Pangkalpinang tahun 2024-2026 dan RPJPD Kota Pangkalpinang 2007-2025 serta program nasional. Permasalahan-permasalahan pembangunan daerah yang dihadapi pada saat ini dan diperkirakan dihadapi juga pada masa yang akan datang oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pangkalpinang adalah sebagai berikut :

a. Masih terdapat jumlah penduduk wajib KTP belum ber KTP el.
b. Tingginya Perkawinan/Perceraian yang belum dicatatkan di Pencatatan Sipil.
c. Rendahnya kesadaran penduduk dalam pengurusan akta kematian yang sudah meninggal dunia belum diuruskan akta kematiannya jika belum dibutuhkan.
d. Kesadaran masyarakat untuk memberikan data yang valid pada dokumen kependudukannya masih rendah.
e. Dengan Sistem SIAK Terpusat Terbaru Daerah hanya sebagai user dan tidak diberikan kewenangan untuk mengolah database kependudukkan sehingga hanya ada beberapa data yang dapat diperoleh dan sebagian data tidak dapat diperoleh.

Adapun peluang-peluang yang terdapat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pangkalpinang yang dapat menunjang kemajuan Dinas adalah sebagai berikut :

1. Adanya peraturan perundang-undangan yang dapat memperkuat operasionalisasi pelaksanaan tugas;
2. Jumlah penduduk Kota Pangkalpinang yang besar merupakan potensi peningkatan perkembangan penduduk
3. Adanya dukungan dari pimpinan/walikota;
4. Dokumen sebagai bukti diri dan dapat dipergunakan untuk proses di instansi/unit kerja lain
5. Diterapkannya sendi-sendi pelayanan dilingkungan dinas secara konsekwen.

Untuk lebih mengoptimalkan hasil pembangunan kependudukan dan pencatatan sipil dan menjaga kesinambungan program, maka diperlukan langkah sebagai berikut :

1. Meningkatkan koordinasi yang lebih harmonis dengan pemerintah dan stakeholder mulai tahap perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan.
2. Meningkatkan sumberdaya manusia yang profesional dibidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.
3. Meningkatkan pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil sesuai dengan Standar Operasional Prosedure (SOP).

4. Meningkatkan animo masyarakat untuk memiliki akta-akta pencatatan sipil.
5. Meningkatkan kemitraan dengan instansi terkait dalam upaya meningkatkan stalsel aktif.
6. Meningkatkan sosialisasi demi tercapainya masyarakat yang sadar dan tertib administrasi kependudukan.
7. Meningkatkan informasi kependudukan dan pencatatan sipil berbasis IT dengan menerapkan inovasi aplikasi sistem.
8. Pelayanan informasi dan pengaduan melalui website dengan alamat *DISDUKCAPIL.PANGKALPINANG.go,id* & *diskucapil@pangkalpinangkota.go.id*
9. Meningkatkan ketersediaan data dan informasi dan pemanfaatannya untuk keperluan pembangunan.

Dari permasalahan dan hambatan yang timbul, dampaknya terhadap pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan daerah serta tantangan dan peluang yang diprediksikan akan dihadapi, dapat diformulasikan menjadi isu-isu penting/strategis yang harus ditindaklanjuti guna mengoptimalkan pencapaian tujuan dan sasaran yang berorientasi pada pencapaian hasil dan target kinerja yang selanjutnya akan dituangkan dalam bentuk perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

Adapun isu strategis yang perlu ditangani dalam pelaksanaan RENSTRA Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pangkalpinang melalui Rencana Kerja (RENJA) Tahunan Perangkat Daerah adalah sebagai berikut:

a. Terbatasnya kapasitas pelayanan administrasi perkantoran.
b. Masih rendahnya tingkat capaian kinerja pelayanan.
c. Pelayanan yang dilakukan belum terintegrasi secara maksimal.
d. Masih rendahnya pemanfaatan data kependudukan untuk keperluan pembangunan.
e. Masih rendahnya sinkronisasi database dengan hasil konsolidasi pusat.

## 2.4 Review Terhadap Rancangan Akhir RKPD

Berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah bahwa penyusunan Rencana Kerja harus mengacu pada Renja Perangkat Daerah tahun sebelumnya dan RENSTRA Perangkat Daerah. Hal ini penting untuk menjaga kesesuaian antara program, kegiatan, lokasi kegiatan, kelompok sasaran, serta perkiraan maju yang harus disusun.

Kemudian perlu dilakukan sinkronisasi dengan rencana program prioritas pada rancangan Awal RKPD Kota Pangkalpinang, untuk dilakukan review agar diperoleh kesesuaian atau relevansinya. Sementara itu pada saat penyusunan RENJA Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pangkalpinang Tahun 2024 ini, Rancangan RKPD belum tersedia sehingga belum dapat direview secara makro.

## Tabel TC.3.1

## REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2025

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program /Kegiatan | RANCANGAN AWAL | | | | Catatan Penting | HASIL ANALISIS KEBUTUHAN | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) |
| | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **Nilai SAKIP Perangkat Daerah** | Pangkalpinang | **72 %** | **4.656.635.551** | | | **72 %** | **4.796.334.618** |
| **01** | | **Indeks Kepuasan Pelayanan Interna Perangkat Daerah** | Pangkalpinang | **90 %** | | **APBD** | | **90 %** | |
| **2.12.01.2.02** | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | **Persentase tersusunnya laporan keuangan perangkat sesuai SAP** | Pangkalpinang | **100%** | **3.590.866.951** | **APBD** | | **100%** | **3.698.592.960** |
| 2.12.01.2.02.01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | Pangkalpinang | 28 | Rp 3.582.978.951 | APBD | | 28 | Rp 3.690.468.320 |
| 2.12.01.2.02.02 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Pangkalpinang | 2 Laporan | Rp 7.888.000 | APBD | | 2 Laporan | Rp 8.124.640 |
| **2.12.01.2.06** | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | **Persentase pelaksanaan administrasi umum perangkat daerah** | Pangkalpinang | 100% | 338.808.600 | APBD | | 100% | 348.972.858 |
| 2.12.01.2.06.01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | Pangkalpinang | 1 Paket | Rp 14.000.000 | APBD | | 1 Paket | Rp 14.420.000 |
| 2.12.01.2.06.02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | Pangkalpinang | 1 Paket | Rp 12.220.500 | APBD | | 1 Paket | Rp 12.587.115 |
| | | | | | | | | | |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program /Kegiatan | RANCANGAN AWAL | | | | Catatan Penting | HASIL ANALISIS KEBUTUHAN | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) |
| 2.12.01.2.06.04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | Pangkalpinang | 1 Paket | Rp 163.606.100 | APBD | | 1 Paket | Rp 168.514.283 |
| 2.12.01.2.06.05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | Pangkalpinang | 2 Paket | Rp 18.982.000 | APBD | | 2 Paket | Rp 19.551.460 |
| 2.12.01.2.06.09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Pangkalpinang | 1 Laporan | Rp 130.000.000 | APBD | | 1 Laporan | Rp 133.900.000 |
| 2.12.01.2.08 | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **Persentase terlaksananya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | Pangkalpinang | 100% | 585.300.000 | APBD | | 100% | 602.859.000 |
| 2.12.01.2.08.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | Pangkalpinang | 1 Laporan | Rp 121..200.000 | APBD | | 1 Laporan | Rp 124.836.000 |
| 2.12.01.2.08.03 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | Pangkalpinang | 1 Laporan | Rp 43.500.000 | APBD | | 1 Laporan | Rp 44.805.000 |
| 2.12.01.2.08.04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | Pangkalpinang | 1 Laporan | Rp 420.600.000 | APBD | | 1 Laporan | Rp 443.218.000 |
| | | | | | | | | | |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program /Kegiatan | RANCANGAN AWAL | | | | Catatan Penting | HASIL ANALISIS KEBUTUHAN | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) |
| **2.12.01.2.09** | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **Persentase barang milik perangkat daerah dalam kondisi baik** | Pangkalpinang | 100% | 141.660.000 | APBD | | 100% | 145.909.800 |
| 2.12.01.2.09.01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | Pangkalpinang | 1 Unit | Rp 39.650.000 | APBD | | 1 Unit | Rp 40.839.500 |
| 2.12.01.2.09.02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya | Pangkalpinang | 3 Unit | 102.010.000 | APBD | | 3 Unit | 105.070.300 |
| **2.12.02.** | **PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK** | **Persentase Perekaman Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik** | Pangkalpinang | **99,5%** | **Rp 470.025.000** | | | **99,5%** | **Rp 484.125.750** |
| | | **Persentase Anak Usia 0-17 Tahun Kurang 1 (satu) Hari yang memiliki KIA** | Pangkalpinang | **73%** | | | | **73%** | |
| | | **Cakupan kepemilikan Kartu Keluarga (KK)** | Pangkalpinang | **97,3%** | | | | **97,3%** | |
| **2.12.02. 2.01** | **Pelayanan Pendaftaran Penduduk** | **Persentase pelayanan pendaftaran penduduk yang dilakukan** | Pangkalpinang | 100% | 437.000.000 | APBD | | 100% | 450.110.000 |
| 2.12.02. 2.01.01 | Pendataan penduduk non permanen dan rentan administrasi kependudukan | Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan | Pangkalpinang | 1 Dokumen | Rp 18.500.000 | APBD | | 1 Dokumen | Rp 19.055.000 |
| | | | | | | | | | |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program /Kegiatan | RANCANGAN AWAL | | | | Catatan Penting | HASIL ANALISIS KEBUTUHAN | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) |
| 2.12.02. 2.01.02 | Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk | Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk | Pangkalpinang | 1 Dokumen | Rp 418.500.000 | APBD | | 1 Dokumen | Rp 431.055.000 |
| **2.12.02. 2.02** | **Penataan Pendaftaran Penduduk** | **Persentase ketersediaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan** | Pangaklpinang | 100% | 23.025.000 | APBD | | 100% | 23.715.750 |
| **2.12.02.2.02.02** | Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan | Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia | Pangkalpinang | 2 Dokumen | Rp 23.025.000 | APBD | | 2 Dokumen | Rp 23.715.750 |
| **2.12.02.2.03** | **Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk** | **Persentase Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk** | Pangkalpinang | **72%** | **10.000.000** | | | **72%** | **10.300.000** |
| 2.12.02.2.03.02 | Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk | Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk | Pangkalpinang | 2 Dokumen | Rp 10.000.000 | APBD | | 2 Dokumen | Rp 10.300.000 |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program /Kegiatan | RANCANGAN AWAL | | | | Catatan Penting | HASIL ANALISIS KEBUTUHAN | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) |
| **2.12.03.** | **PROGRAM PENCATATAN SIPIL** | **Kepemilikan Akta Kelahiran** | | **98,5 %** | **Rp 54.600.000** | | | **98,5 %** | **Rp 56.238.000** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **2.12.03. 2.01** | **Pelayanan Pencatatan Sipil** | **Rasio Bayi Berakta Kelahiran** | Pangkalpinang | 930 | 34.600.000 | APBD | | 930 | 35.638.000 |
| 2.12.03. 2.01.01 | Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting | Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting | Pangkalpinang | 1 Dokumen | Rp 34.600.000 | APBD | | 1 Dokumen | Rp 35.638.000 |
| **2.12.03. 2.02** | **Penyelenggaraan Pencatatan Sipil** | **Persentase Penerbitan Akta Perkawinan** | Pangkalpinang | 67,8 % | Rp 20.000.000 | APBD | | 67,8 % | Rp 20.600.000 |
| | | **Persentase Penerbitan Akta Perceraian** | Pangkalpinang | 69,5 % | | APBD | | 69,5 % | |
| | | **Persentase Penerbitan Akta Kematian** | Pangkalpinang | 100 % | | APBD | | 100 % | |

| **Kode** | **Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan** | **Indikator Kinerja Program /Kegiatan** | **RANCANGAN AWAL** | | | | **Catatan Penting** | **HASIL ANALISIS KEBUTUHAN** | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | **Lokasi** | **Target Capaian Kinerja** | **Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif** | **Sumber Dana** | | **Target Capaian Kinerja** | **Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif** |
| **(1)** | **(2)** | **(3)** | **(4)** | **(5)** | **(6)** | **(7)** | **(8)** | **(9)** | **(10)** |
| 2.12.03. 2.02.03 | Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pencatatan Sipil | Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pencatatan Sipil | Pangkalpinang | 1 Laporan | Rp 8.000.000 | APBD | | 1 Laporan | Rp 8.240.000 |
| 2.12.03. 2.02.04 | Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil | Jumlah Laporan Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil | Pangkalpinang | 1 Laporan | Rp 2.000.000 | APBD | | 1 Laporan | Rp 2.060.000 |
| 2.12.03. 2.02.06 | Fasilitasi Terkait Pencatatan Sipil | Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pencatatan Sipil | Pangkalpinang | 1 Laporan | Rp 10.000.000 | APBD | | 1 Laporan | Rp 10.300.000 |
| | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **2.12.04.** | **PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN** | **persentase Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerjasama** | Pangkalpinang | 84,84 % | Rp 35.200.000 | APBD | | 84,84 % | Rp 36.256.000 |
| 2.12.04. 2.03 | **Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan** | **Persentase Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan** | **Pangkalpinang** | **80%** | **35.200.000** | **APBD** | | **80%** | **36.256.000** |
| | | | | | | | | | |

| **Kode** | **Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan** | **Indikator Kinerja Program /Kegiatan** | **RANCANGAN AWAL** | | | | **Catatan Penting** | **HASIL ANALISIS KEBUTUHAN** | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | **Lokasi** | **Target Capaian Kinerja** | **Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif** | **Sumber Dana** | | **Target Capaian Kinerja** | **Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif** |
| **(1)** | **(2)** | **(3)** | **(4)** | **(5)** | **(6)** | **(7)** | **(8)** | **(9)** | **(10)** |
| 2.12.04. 2.03.01 | Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Non Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan | Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan | Pangkalpinang | 1 Laporan | Rp 12.950.000 | APBD | | 1 Laporan | Rp 13.338.500 |
| 2.12.04. 2.03.03 | Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan | Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan | Pangkalpinang | 1 Laporan | Rp 22.250.000 | APBD | | 1 Laporan | Rp 22.917.500 |
| **2.12.05.** | **PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN** | **persentase keserasian dan Akurasi database kependudukan** | Pangkalpinang | 90% | Rp 10.050.000 | APBD | | 90% | Rp 10.351.500 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **2.12.05. 2.01** | **Penyusunan Profil Kependudukan** | **Persentase Penyusunan Profil Kependudukan** | Pangkalpinang | 80% | Rp 10.050.000 | APBD | | 80% | Rp 10.351.500 |
| | Keg Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang lain | Jumlah dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta kebutuhan yang lain | Pangkalpinang | 1 Dokumen | Rp 10.050.000 | APBD | | 1 Dokumen | Rp 10.351.500 |
| | **JUMLAH TOTAL USULAN RENJA AKHIR 2025 MELALUI APBD** | | | | **Rp 5.226.510.551** | | | | **Rp 5.383.305.868** |
| | **JUMLAH USULAN RENJA AKHIR 2025 MELALUI DAK** | | | | | | | | |
| | **JUMLAH USULAN RENJA AKHIR 2025 MELALUI APBD** | | | | | | | | |

## 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Sebagai salah satu lembaga teknis daerah yang melayani kepentingan masyarakat dalam urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 50 Tahun 2021 bagian kesepuluh, paragraf 1 (satu) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe B merupakan unsur pelaksana teknis daerah bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas, berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah, dengan tugas dan fungsi serta susunan organisasi, maka para pemangku kepentingan (stakeholders) yang berkaitan langsung dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pangkalpinang adalah para petugas di tingkat kelurahan, Kecamatan dan RT/RW di lingkungan Pemerintah Kota Pangkalpinang.

Kemudian masih terdapat kritik dan saran dari pihak eksternal yang menyangkut peningkatan pelayanan dan sarana prasarana penunjang pelayanan lainnya.

**Tabel T-C.32**

**Usulan Program dan Kegiatan dari Pemangku Kepentingan**
**Kota PangkalpinangTahun 2025**

Nama Perangkat Daerah : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pangkalpinang

| No | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Besaran/Volume | Catatan |
|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| 1 | Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintah Dareah | | | | |
| | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak kendaraan perorangan Dinas atau Kendaraan dinas Jabatan | Pangkalpinang | Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipeliharan dan dibayarkan pajaknya | 1 unit | |
| | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | pangkalpinang | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 3 Unit | |

# BAB III
# TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

## 3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Hal-hal mengenai warga Negara dan penduduk diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 26 ayat 3 yang implementasi diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Esensi dari pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 adalah pengakuan Negara dan perlindungan terhadap hak sipil dan status hukum penduduk dibidang pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, sehingga tertib administrasi dibidang kependudukan merupakan kata kunci dalam memberikan hak-hak sipil dan status hukum penduduk.

Dalam upaya mencapai tertib administrasi dibidang kependudukan, ada 3 hal pokok sasaran kebijakan pembangunan nasional yang tertuang dalam RPJMN dengan mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan yaitu :

- Database kependudukan
- Penerbitan NIK (Nomor Induk Kependudukan)
- Dokumen kependudukan (KK,KTP, Akta Capil dll )

Tabel 3.1
Identifikasi Kebijakan Nasional

| No. | Kebijakan Nasional | Sumber | Keterangan |
|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 1 | Penyusunan Database | APBN | Tersentralisasi secara nasional |
| 2 | Penerbitan NIK | APBN | Tersentralisasi secara nasional |
| 3 | Dokumen Kependudukan | APBN | Standard Nasional |

Pembangunan nasional merupakan upaya semua komponen bangsa yang dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan bernegara sebagaimana diamanatkan oleh Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan berdasarkan Pancasila. Pencapaian tujuan ini dilaksanakan secara bertahap, mulai dari jangka panjang, jangka menengah, hingga tahunan. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 menggariskan Visi Indonesia tahun 2025 yaitu “Indonesia Yang Mandiri, Maju, Adil dan Makmur“ yang pelaksanaannya dibagi ke dalam 4 (empat) tahap pembangunan jangka menengah. Pembangunan tahun 2023 berada pada tahap jangka menengah yang ke-lima yang arahnya digariskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 dengan visi “Mewujudkan Indonesia Yang Berdaulat, Makmur, Dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”.

Upaya untuk mewujudkan visi ini adalah melalui 7 agenda Pembangunan yaitu:

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan;
2. Menembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan;
3. Meningkatkan sumberdaya manusia yang berkualitas dan berdaya saing
4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan;
5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar;
6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim;
7. Meningkatkan stabilitas politik, hukum, pertahanan, dan keamanan dan transportasi pelayanan publik.

### 3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Perangkat Daerah

Arah kebijakan pembangunan daerah yang tertuang dalam Rancangan Akhir RKPD Kota Pangkalpinang Tahun 2025 merupakan prioritas dan sasaran pembangunan daerah Kota Pangkalpinang untuk tahun rencana yang terkait dengan visi, misi dan prioritas program pembangunan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih yang selanjutnya dijabarkan secara operasional dalam visi, misi, tujuan dan sasaran, strategi dan arah kebijakan perangkat daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing. Arah kebijakan pada tahun 2024, pembangunan di Kota Pangkalpinang berlandaskan pelaksanaan, pencapaian dan keberlanjutan pembangunan tahun 2024, pada tahun 2024 pembangunan yang masih di titik beratkan pada tata kelola pemerintahan maka pada tahun 2025 pembangunan Kota Pangkalpinang mulai fokus pada pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik. Sementara tema pembangunan pada tahun 2025 yaitu “Pemerataan Kesejahteraan dan Daya Saing Sumber Daya Manusia”.

Infrastruktur merupakan sarana utama dalam melaksanakan pembangunan dan sangat berpengaruh terhadap peningkatan ekonomi serta pengembangan daerah. Tanpa jalan dan akses penghubung, pembangunan fasilitas masyarakat dan fasilitas pemerintah sulit di realisasikan. Dalam upaya meningkatkan pemerataan pembangunan infrastruktur berbagai upaya dilakukan dengan peningkatan pembangunan jalan, jembatan, ketersediaan air bersih dan sanitasi serta penataan kawasan kumuh.

Selain infrastruktur, pelayanan publik yang prima merupakan salah satu prioritas pembangunan di tahun 2025. Pelayanan publik yang diselenggarakan pemerintah Kota Pangkalpinang harus mencakup pelayanan kepada seluruh masyarakat yang membutuhkan dan yang paling penting adalah bagaimana masyarakat dapat merasakan kepuasan dari layanan yang di berikan kepada mereka. Terkait arah kebijakan pembangunan Kota Pangkalpinang pada tahun 2025, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pangkalpinang juga mengusulkan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah, sarana dan prasarana penunjang pelayanan (APBD).

Tujuan pembangunan daerah yang ingin dicapai dalam RENJA Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pangkalpinang Tahun 2025 dikaitkan dengan sasaran prioritas daerah 2025 dan RENSTRA Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pangkalpinang 2024 – 2026 adalah sebagai berikut :

**“Meningkatkan Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Dukcapil “**

Adapun sasaran yang akan dituju dalam Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pangkalpinang ini berdasarkan RENSTRA Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pangkalpinang Tahun 2024-2026 adalah sebagai berikut :

**SASARAN DAN INDIKATOR TAHUN 2024-2026**

| No | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | SATUAN | TARGET | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | Meningkatkan Cakupan kepemilikan dokumen kependudukan dan catatan sipil | Cakupan kepemilikan dokumen kependudukan dan catatan sipil | % | 78,82 | 78,85 | 78,90 |
| 2 | Meningkatnya Rata-rata Lama pengurusan dokumen kependudukan | Lama pengurusan dokumen kependudukan | Hari | 3 | 3 | 3 |
| | | 1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah | Nilai | 71,5 | 72 | 72,5 |
| | | 2. Indeks Kepuasan Pelayanan Internal Perangkat Daerah | Nilai | 85 | 90 | 95 |
| | | 3. Persentase Perekaman Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik | % | 99,4 | 99,5 | 99,6 |
| | | 4. Persentase Anak Usia 0-17 Tahun Kurang 1 (satu) Hari yang memiliki KIA | % | 70 | 73 | 76 |
| | | 5. Cakupan kepemilikan Kartu Keluarga (KK) | % | 97 | 97,3 | 97,6 |
| | | 6. Kepemilikan Akta Kelahiran | % | 96,5 | 98,5 | 99 |
| | | 7. Persentase Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerjasama | % | 78,79 | 84,84 | 90,90 |
| | | 8. Persentase keserasian dan akurasi database kependudukan | % | 80 | 90 | 100 |

Berikut ini tabel identifikasi Prioritas Pembangunan Kota Pangkalpinang tahun 2025 seperti yang tercantum dalam dokumen RPD Kota Pangkalpinang Tahun 2024-2026

**Tabel 3.2**
**Identifikasi Prioritas Pembangunan Daerah**
**Kota Pangkalpinang tahun 2025**

| No. | Kebijakan Daerah | Sumber | Keterangan |
|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 1 | Akselerasi reformasi birokrasi dan demokrasi daerah | RPD | |
| 2 | Peningkatan kompetensi dan keterampilan angkatan kerja sesuai kebutuhan pasar kerja | RPD | |
| 3 | Percepatan penanganan kemiskinan ekstrim | RPD | |
| 4 | Peningkatan kualitas ekonomi kerakyatan | RPD | |
| 5 | Peningkatan kualitas tata ruang wilayah berbasis lingkungan | RPD | |

Sedangkan arah Prioritas Pembangunan Kota Pangkalpinang yang terkait dengan tugas dan fungsi, tujuan dan sasaran, strategi dan arah kebijakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pangkalpinang dapat diidentifikasikan pada Prioritas Pembangunan ke (1) Akselerasi reformasi birokrasi dan demokrasi daerah untuk urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

## 3.3. Program dan Kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pangkalpinang

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa pada tahun ke-3 (n-3) RENSTRA Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pangkalpinang Tahun 2024-2026, Program yang dilaksanakan pada tahun 2025 sama dengan program pada tahun 2023 terdiri dari : 1 (satu) program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota, 4 (Empat) Program non Urusan yang diorientasikan pada layanan publik dan sesuai dengan Prioritas Daerah dan Sasaran Daerah pada tahun 2025 adalah sebagai berikut :

I. **Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota,** yang terdiri dari kegiatan :

1) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
   a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
   b. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
2) Administrasi Umum Perangkat Daerah
   a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
   b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
   c. Penyediaan Bahan Logistik Kantor;
   d. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan;
   e. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD;

3) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
   a. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
   b. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
   c. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor;
4) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
   a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
   b. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

II. **Program Pendaftaran Penduduk**, yang terdiri dari kegiatan :

1) Pelayanan Pendaftaran Penduduk
   a. Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan;
   b. Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk;
2) Penataan Pendaftaran Penduduk
   a. Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan;
3) Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk
   a. Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk;

III. **Program Pencatatan Sipil**, yang terdiri dari kegiatan :

1) Pelayanan Pencatatan Sipil
   a. Pencatatan Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting;
2) Penyelenggaraan Pencatatan Sipil
   a. Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pencatatan Sipil;
   b. Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan ddan Pencatatan Peristiwa Penting terkait Pencatatan Sipil;
   c. Fasilitasi Terkait Pencatatan Sipil;

IV. **Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan**, yang terdiri dari kegiatan:

1) Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
   a. Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Non Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pengelolaan Informasi Administrasi;
   b. Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan;

V. **Program Pengelolaan Profil Kependudukan** , yang terdiri dari kegiatan :

1) Penyusunan Profil Kependudukan, yang terdiri dari sub kegiatan :

a. Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota;

# BAB IV
# RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana Kerja (RENJA) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pangkalpinang Tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan pembangunan, tahun 2024 sebagai acuan bagi perangkat daerah yang berisi program dan kegiatan serta pagu indikatif. Bagi perangkat daerah sebagai pelaksana program, Renja Tahun 2025 yang ditindaklanjuti dengan menyusun kerangka anggaran dalam APBD Tahun 2025 yang dalam pelaksanaannya memaksimalkan sumber daya yang ada terutama sumber daya anggaran. Mengingat keterbatasan sumber daya anggaran pelaksanaan program pembangunan yang ditetapkan dalam Renja Tahun 2025 dan Kebijakan Umum APBD, Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2025, diharapkan dana yang tersedia benar-benar dapat dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat luas. Disamping itu perangkat daerah juga membuat rencana aksi dalam upaya pelaksanaan program dan kegiatan.

Pelaksanaan kegiatan Renja Tahun 2025 harus dilakukan secara efektif dan efisien. Untuk itu diperlukan upaya keterpaduan dan sinergitas antar bidang dalam OPD, OPD dengan perangkat daerah lainnya, maupun OPD dengan masyarakat pada umumnya. Untuk mencapai keterpaduan dan sinkronisasi kegiatan yang telah diprogramkan dilakukan dengan memanfaatkan forum perencanaan, rapat koordinasi maupun penjaringan aspirasi masyarakat sehingga tercapai sinergi dalam pelaksanaannya dengan tetap menerapkan prinsip-prinsip safe guarding yaitu transparansi, akuntabilitas dan partisipasi serta monitoring dan evaluasi.

Berdasarkan Surat Edaran Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembanggan Darah Nomor 011/SE/Bapperida-/III/2024 tanggal 18 Maret 2024 tentang Pedoman Penyempurnaan Rancangan Akhir Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2025 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pangkalpinang ditetapan program prioritas dan pagu indikatif sumberdana APBD Tahun 2025 sebesar Rp. 5.226.510,551 (Lima milyar dua ratus dua puluh enam juta lima ratus sepuluh ribu lima ratus lima puluh satu rupiah) dan program prioritas antara lain : Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Program Pendaftaran Penduduk, Program Pencatatan Sipil, Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Program Pengelolaan Profil Kependudukan.

Untuk jelasnya Rencana Kerja Akhir dan pendanaan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dapat kita lihat pada tabel TC 33 berikut:

# RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025

# DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2026

# KOTA PANGKALPINANG

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program /Kegiatan | RANCANGAN AWAL | | | | Catatan Penting | HASIL ANALISIS KEBUTUHAN | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) |
| | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **Nilai SAKIP Perangkat Daerah** | Pangkalpinang | **72 %** | **4.656.635.551** | | | **72,5 %** | **4.796.334.618** |
| **01** | | **Indeks Kepuasan Pelayanan Interna Perangkat Daerah** | Pangkalpinang | **90 %** | | **APBD** | | **95 %** | |
| **2.12.01.2.02** | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | **Persentase tersusunnya laporan keuangan perangkat sesuai SAP** | Pangkalpinang | **100%** | **3.590.866.951** | **APBD** | | **100%** | **3.698.592.960** |
| 2.12.01.2.02.01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | Pangkalpinang | 28 | Rp 3.582.978.951 | APBD | | 28 | Rp 3.690.468.320 |
| 2.12.01.2.02.02 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Pangkalpinang | 2 Laporan | Rp 7.888.000 | APBD | | 2 Laporan | Rp 8.124.640 |
| **2.12.01.2.06** | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | **Persentase pelaksanaan administrasi umum perangkat daerah** | Pangkalpinang | 100% | 338.808.600 | APBD | | 100% | 348.972.858 |
| 2.12.01.2.06.01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | Pangkalpinang | 1 Paket | Rp 14.000.000 | APBD | | 1 Paket | Rp 14.420.000 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.12.01.2.06.02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | Pangkalpinang | 1 Paket | Rp 12.220.500 | APBD | | 1 Paket | Rp 12.587.115 |
| **Kode** | **Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan** | **Indikator Kinerja Program /Kegiatan** | **RANCANGAN AWAL** | | | | **Catatan Penting** | **HASIL ANALISIS KEBUTUHAN** | |
| | | | **Lokasi** | **Target Capaian Kinerja** | **Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif** | **Sumber Dana** | | **Target Capaian Kinerja** | **Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif** |
| **(1)** | **(2)** | **(3)** | **(4)** | **(5)** | **(6)** | **(7)** | **(8)** | **(9)** | **(10)** |
| 2.12.01.2.06.04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | Pangkalpinang | 1 Paket | Rp 163.606.100 | APBD | | 1 Paket | Rp 168.514.283 |
| 2.12.01.2.06.05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | Pangkalpinang | 2 Paket | Rp 18.982.000 | APBD | | 2 Paket | Rp 19.551.460 |
| 2.12.01.2.06.09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Pangkalpinang | 1 Laporan | Rp 130.000.000 | APBD | | 1 Laporan | Rp 133.900.000 |
| 2.12.01.2.08 | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **Persentase terlaksananya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | Pangkalpinang | 100% | 585.300.000 | APBD | | 100% | 602.859.000 |
| 2.12.01.2.08.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | Pangkalpinang | 1 Laporan | Rp 121..200.000 | APBD | | 1 Laporan | Rp 124.836.000 |
| | | | | | | | | | |
| **Kode** | **Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan** | **Indikator Kinerja Program /Kegiatan** | **RANCANGAN AWAL** | | | | **Catatan Penting** | **HASIL ANALISIS KEBUTUHAN** | |
| | | | **Lokasi** | **Target Capaian Kinerja** | **Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif** | **Sumber Dana** | | **Target Capaian Kinerja** | **Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif** |
| **(1)** | **(2)** | **(3)** | **(4)** | **(5)** | **(6)** | **(7)** | **(8)** | **(9)** | **(10)** |
| 2.12.01.2.08.03 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | Pangkalpinang | 1 Laporan | Rp 43.500.000 | APBD | | 1 Laporan | Rp 44.805.000 |
| 2.12.01.2.08.04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa | Pangkalpinang | 1 Laporan | Rp | APBD | | 1 Laporan | Rp 443.218.000 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Kantor | Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | | | 420.600.000 | | | | |
| **2.12.01.2.09** | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **Persentase barang milik perangkat daerah dalam kondisi baik** | Pangkalpinang | 100% | 141.660.000 | APBD | | 100% | 145.909.800 |
| 2.12.01.2.09.01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | Pangkalpinang | 1 Unit | Rp 39.650.000 | APBD | | 1 Unit | Rp 40.839.500 |
| 2.12.01.2.09.02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya | Pangkalpinang | 3 Unit | 102.010.000 | APBD | | 3 Unit | 105.070.300 |
| **2.12.02.** | **PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK** | **Persentase Perekaman Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik** | Pangkalpinang | **99,5%** | **Rp 470.025.000** | | | **99,6%** | **Rp 484.125.750** |
| | | **Persentase Anak Usia 0-17 Tahun Kurang 1 (satu) Hari yang memiliki KIA** | Pangkalpinang | **73%** | | | | **76%** | |
| | | **Cakupan kepemilikan Kartu Keluarga (KK)** | Pangkalpinang | **97,3%** | | | | **97,3%** | |

| **Kode** | **Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan** | **Indikator Kinerja Program /Kegiatan** | **RANCANGAN AWAL** | | | | **Catatan Penting** | **HASIL ANALISIS KEBUTUHAN** | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | **Lokasi** | **Target Capaian Kinerja** | **Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif** | **Sumber Dana** | | **Target Capaian Kinerja** | **Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif** |
| **(1)** | **(2)** | **(3)** | **(4)** | **(5)** | **(6)** | **(7)** | **(8)** | **(9)** | **(10)** |
| **2.12.02. 2.01** | **Pelayanan Pendaftaran Penduduk** | **Persentase pelayanan pendaftaran penduduk yang dilakukan** | Pangkalpinang | 100% | 437.000.000 | APBD | | 100% | 450.110.000 |
| 2.12.02. 2.01.01 | Pendataan penduduk non permanen dan rentan administrasi kependudukan | Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan | Pangkalpinang | 1 Dokumen | Rp 18.500.000 | APBD | | 1 Dokumen | Rp 19.055.000 |
| 2.12.02. 2.01.02 | Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas | Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan | Pangkalpinang | 1 Dokumen | Rp 418.500.000 | APBD | | 1 Dokumen | Rp 431.055.000 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Pendaftaran Penduduk | Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk | | | | | | | |
| **2.12.02. 2.02** | **Penataan Pendaftaran Penduduk** | **Persentase ketersediaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan** | Pangaklpinang | 100% | 23.025.000 | APBD | | 100% | 23.715.750 |
| **2.12.02.2.02.02** | Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan | Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia | Pangkalpinang | 2 Dokumen | Rp 23.025.000 | APBD | | 2 Dokumen | Rp 23.715.750 |
| **2.12.02.2.03** | **Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk** | **Persentase Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk** | Pangkalpinang | **72%** | **10.000.000** | | | **75%** | **10.300.000** |
| | | | | | | | | | |
| **Kode** | **Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan** | **Indikator Kinerja Program /Kegiatan** | **RANCANGAN AWAL** | | | | **Catatan Penting** | **HASIL ANALISIS KEBUTUHAN** | |
| | | | **Lokasi** | **Target Capaian Kinerja** | **Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif** | **Sumber Dana** | | **Target Capaian Kinerja** | **Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif** |
| **(1)** | **(2)** | **(3)** | **(4)** | **(5)** | **(6)** | **(7)** | **(8)** | **(9)** | **(10)** |
| 2.12.02.2.03.02 | Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk | Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk | Pangkalpinang | 2 Dokumen | Rp 10.000.000 | APBD | | 3 Dokumen | Rp 10.300.000 |
| **2.12.03.** | **PROGRAM PENCATATAN SIPIL** | **Kepemilikan Akta Kelahiran** | | **98,5 %** | **Rp 54.600.000** | | | **99 %** | **Rp 56.238.000** |
| **2.12.03. 2.01** | **Pelayanan Pencatatan Sipil** | **Rasio Bayi Berakta Kelahiran** | Pangkalpinang | 930 | 34.600.000 | APBD | | 935 | 35.638.000 |
| 2.12.03. 2.01.01 | Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting | Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting | Pangkalpinang | 1 Dokumen | Rp 34.600.000 | APBD | | 1 Dokumen | Rp 35.638.000 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **2.12.03. 2.0** | **Penyelenggaraan Pencatatan Sipil** | **Persentase Penerbitan Akta Perkawinan** | Pangkalpinang | 67,8 % | Rp 20.000.000 | APBD | | 78 % | Rp 20.600.000 |
| | | **Persentase Penerbitan Akta Perceraian** | Pangkalpinang | 69,5 % | | APBD | | 71 % | |
| | | **Persentase Penerbitan Akta Kematian** | Pangkalpinang | 100 % | | APBD | | 100 % | |
| 2.12.03. 2.02.03 | Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pencatatan Sipil | Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pencatatan Sipil | Pangkalpinang | 1 Laporan | Rp 8.000.000 | APBD | | 1 Laporan | Rp 8.240.000 |
| **Kode** | **Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan** | **Indikator Kinerja Program /Kegiatan** | **RANCANGAN AWAL** | | | | **Catatan Penting** | **HASIL ANALISIS KEBUTUHAN** | |
| | | | **Lokasi** | **Target Capaian Kinerja** | **Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif** | **Sumber Dana** | | **Target Capaian Kinerja** | **Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif** |
| **(1)** | **(2)** | **(3)** | **(4)** | **(5)** | **(6)** | **(7)** | **(8)** | **(9)** | **(10)** |
| | | | | | | | | | |
| 2.12.03. 2.02.04 | Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil | Jumlah Laporan Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil | Pangkalpinang | 1 Laporan | Rp 2.000.000 | APBD | | 1 Laporan | Rp 2.060.000 |
| 2.12.03. 2.02.06 | Fasilitasi Terkait Pencatatan Sipil | Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pencatatan Sipil | Pangkalpinang | 1 Laporan | Rp 10.000.000 | APBD | | 1 Laporan | Rp 10.300.000 |
| **2.12.04.** | **PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN** | **persentase Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerjasama** | Pangkalpinang | 84,84 % | Rp 35.200.000 | APBD | | 90,90 % | Rp 36.256.000 |
| | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.12.04. 2.03 | **Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan** | **Persentase Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan** | **Pangkalpinang** | **80%** | **35.200.000** | **APBD** | | **90%** | **Rp 36.256.000** |
| 2.12.04. 2.03.01 | Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Non Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan | Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan | Pangkalpinang | 1 Laporan | Rp 12.950.000 | APBD | | 1 Laporan | Rp 13.338.500 |
| | | | | | | | | | |

| **Kode** | **Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan** | **Indikator Kinerja Program /Kegiatan** | **RANCANGAN AWAL** | | | | **Catatan Penting** | **HASIL ANALISIS KEBUTUHAN** | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | **Lokasi** | **Target Capaian Kinerja** | **Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif** | **Sumber Dana** | | **Target Capaian Kinerja** | **Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif** |
| **(1)** | **(2)** | **(3)** | **(4)** | **(5)** | **(6)** | **(7)** | **(8)** | **(9)** | **(10)** |
| | | | | | | | | | |
| 2.12.04. 2.03.03 | Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan | Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan | Pangkalpinang | 1 Laporan | Rp 22.250.000 | APBD | | 1 Laporan | Rp 22.917.500 |
| **2.12.05.** | **PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN** | **persentase keserasian dan Akurasi database kependudukan** | Pangkalpinang | 90% | Rp 10.050.000 | APBD | | 90% | Rp 10.351.500 |
| **2.12.05. 2.01** | **Penyusunan Profil Kependudukan** | **Persentase Penyusunan Profil Kependudukan** | Pangkalpinang | 80% | Rp 10.050.000 | APBD | | 90% | Rp 10.351.500 |
| | Keg Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang lain | Jumlah dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta kebutuhan yang lain | Pangkalpinang | 1 Dokumen | Rp 10.050.000 | APBD | | 1 Dokumen | Rp 10.351.500 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **JUMLAH TOTAL USULAN RENJA 2025 MELALUI APBD** | | | | **Rp 5.226.510.551** | | | | **Rp 5.383.305.868** |
| | **JUMLAH USULAN RENJA 2025 MELALUI DAK** | | | | | | | | |
| | **JUMLAH USULAN RENJA 2025 MELALUI APBD** | | | | | | | | |

Berdasarkan Keputusan Menteri dalam negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, Pemerintah daerah melakukan pemetaan program dan kegiatan menurut klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur sesuai dengan Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini, dan Surat Nomor 000.724/227/BAPPERIDA/VII/2024 tanggal 09 Juli 2024 tentang Penyampaian Dokumen Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah Tahun 2025, maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan pagu indikatif yang telah ditetapkan sebesar Rp. 5.226.510.551,- (Lima milyar dua ratus dua puluh enam juta lima ratus sepuluh ribu lima ratus lima puluh satu rupiah). melakukan pemetaan sebagai mana dimaksud diatas.

Penyempurnaan pemetaan program dan kegiatan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 masih terus harus dilakukan dengan cara konsultasi dan koordinasi instansi/lembaga terkait dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri.

Adapun gambaran pemetaan yang dilakukan oleh dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2025 (terdapat dalam lampiran Renja Akhir 2025).

# BAB V
# PENUTUP

Rencana Kerja (RENJA) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pangkalpinang Tahun 2025 melalui beberapa tahap mulai dari perencanaan, pengajuan usulan program dan kegiatan ke forum MUSRENBANG, perumusan, penyusunan, verifikasi sampai dengan pengesahan dan penetapannya. Dalam proses ini terdapat banyak kekurangan yang masih harus diperbaiki guna menuju kesempurnaan agar diperoleh kesesuaian dan keterkaitan dengan dokumen perencanaan daerah lainnya baik secara topdown maupun bottomup.

Dari hasil analisis kebutuhan terhadap program dan kegiatan tahun 2023 dan 2024, ada beberapa kegiatan dari 5 (Lima) program Urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang tidak terakomodir (dianggarkan dan /atau dikurangi pagu anggarannya), sehingga tidak mencapai target kinerja yang direncanakan seperti yang tercantum dalam RENSTRA Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pangkalpinang Tahun 2024-2026 yang kemudian berdampak langsung terhadap pencapaian 6 (enam) Indikator Kinerja Kunci (IKK) untuk lingkup Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Rumusan rencana program dan kegiatan dalam Rencana Kerja Akhir ini dapat menjadi acuan bagi Tim Forum Musrenbang dalam menyusun RKPD Tahun 2025 dan menjadi pedoman unit kerja pelaksana lingkup Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pangkalpinang dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Belanja Langsung tahun anggaran berkenaan apabila nantinya sudah ditetapkan dalam Rencana Kerja Tahun 2025.

Dengan dukungan dan kerjasama semua pihak, kami harapkan Rencana Kerja (RENJA) ini dapat bermanfaat bagi kita semua dalam pelaksanaan penyelenggaraan program pembangunan dan pemerintahan.

PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA PANGKALPINANG TAHUN 2025

| KODE | | | | | | URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN | INDIKATOR | KELOMPOK SASARAN | SATUAN | TARGET | PAGU INDIKATIF 2025 | SUMBER DANA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2 | 12 | 01 | | | | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **Nilai SAKIP Perangkat Daerah** | **Terwujudnya akuntabilitas kinerja dan pelayanan prima internal perangkat daerah** | **Nilai** | **72** | **Rp 4,656,635,551** | |
| | | | | | | | **Indeks Kepuasan Pelayanan Internal Perangkat Daerah** | | **Nilai** | **90** | | |
| 2 | 12 | 01 | 2.02 | | | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | **Persentase tersusunnya laporan keuangan perangkat sesuai SAP** | **Terpenuhinya penyampaian dokumen perencanaan, penganggaran dan kinerja perangkat daerah tepat waktu** | **%** | **100** | **Rp 3,590,866,951** | |
| 2 | 12 | 01 | 2.02 | 0001 | | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | | Orang/ bulan | 28 | Rp 3,582,978,951 | APBD |
| 2 | 12 | 01 | 2.02 | 0005 | | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | | Laporan | 1 | Rp 7,888,000 | APBD |
| 2 | 12 | 01 | 2.06 | | | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | **Persentase pelaksanaan administrasi umum perangkat daerah** | **Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah** | **%** | **100** | **Rp 338,808,600** | |
| 2 | 12 | 01 | 2.06 | 0001 | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | | Paket | 1 | Rp 14,000,000 | APBD |
| 2 | 12 | 01 | 2.06 | 0002 | | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | | Paket | 1 | Rp 12,220,500 | APBD |
| 2 | 12 | 01 | 2.06 | 0004 | | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | | Paket | 1 | Rp 163,606,100 | APBD |
| 2 | 12 | 01 | 2.06 | 0005 | | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | | Paket | 2 | Rp 18,982,000 | APBD |
| 2 | 12 | 01 | 2.06 | 0009 | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | Laporan | 1 | Rp 130,000,000 | APBD |
| 2 | 12 | 01 | 2.08 | | | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **Persentase terlaksananya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **%** | **100** | **Rp 585,300,000** | |
| 2 | 12 | 01 | 2.08 | 0002 | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | | Laporan | 1 | Rp 121,200,000 | APBD |
| 2 | 12 | 01 | 2.08 | 0003 | | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | | Laporan | 1 | Rp 43,500,000 | APBD |
| 2 | 12 | 01 | 2.08 | 0004 | | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | | Laporan | 1 | Rp 420,600,000 | APBD |
| 2 | 12 | 01 | 2.09 | | | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **Persentase barang milik perangkat daerah dalam kondisi baik** | **Terpeliharanya barang milik perangkat daerah** | **%** | **100** | **Rp 141,660,000** | |
| 2 | 12 | 01 | 2.09 | 0001 | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | | Unit | 1 | Rp 39,650,000 | APBD |
| 2 | 12 | 01 | 2.09 | 0002 | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya | | Unit | 3 | Rp 102,010,000 | APBD |
| 2 | 12 | 02 | | | | **PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK** | **Persentase Perekaman Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik** | **Terlaksananya Pendaftaran Penduduk** | **%** | **99.5** | **Rp 470,025,000** | |
| 2 | 12 | 02 | | | | | **Persentase Anak Usia 0-17 Tahun Kurang 1 (satu) Hari yang memiliki KIA** | | **%** | **73** | | |
| 2 | 12 | 02 | | | | | **Cakupan kepemilikan Kartu Keluarga (KK)** | | **%** | **97.3** | | |
| 2 | 12 | 01 | 2.01 | | | **KEGIATAN : Pelayanan Pendaftaran Penduduk** | **Persentase pelayanan pendaftaran penduduk yang dilakukan** | **Terlaksananya Pelayanan Pendaftaran Penduduk** | **%** | **100** | **Rp 437,000,000** | |
| 2 | 12 | 01 | 2.01 | 0001 | | Pendataan penduduk non permanen dan rentan administrasi kependudukan | Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan | | Dokumen | 1 | **Rp 18,500,000** | APBD |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 12 | 01 | 2.01 | 0002 | | Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk | Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk | | Dokumen | 1 | Rp | 418,500,000 | APBD |
| 2 | 12 | 01 | 2.02 | | | **KEGIATAN ; Penataan Pendaftaran Penduduk** | **Persentase ketersediaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan** | **Terlaksananya Penataan Pendaftaran Penduduk** | **%** | **100** | **Rp** | **23,025,000** | |
| 2 | 12 | 01 | 2.02 | 0002 | | Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan | Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia | | Dokumen | 2 | Rp | 23,025,000 | APBD |
| 2 | 12 | 01 | 2.03 | | | **KEGIATAN : Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk** | **Persentase Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk** | **Terlaksananya Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk** | **%** | **72** | **Rp** | **10,000,000** | |
| 2 | 12 | 01 | 2.03 | 0002 | | Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk | Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk | | Dokumen | 2 | Rp | 10,000,000 | APBD |
| 2 | 12 | 03 | | | | **PROGRAM PENCATATAN SIPIL** | **Kepemilikan Akta Kelahiran** | **Terlaksananya Pencatatan Sipil** | **%** | **98.5** | **Rp** | **54,600,000** | |
| 2 | 12 | 01 | 2.01 | | | **Kegiatan : Pelayanan Pencatatan Sipil** | **Rasio Bayi Berakta Kelahiran** | **Terlaksananya Pelayanan Pencatatan Sipil yang terverifikasi** | **‰** | **930** | **Rp** | **34,600,000** | |
| 2 | 12 | 01 | 2.01 | 0001 | | Sub Kegiatan : Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting | Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting | | Dokumen | 1 | Rp | 34,600,000 | APBD |
| 2 | 12 | 01 | 2.02 | | | **Kegiatan :Penyelenggaraan Pencatatan Sipil** | **Persentase Penerbitan Akta Perkawinan** | **Terlaksananya penyelenggaraan Pencatatan Sipil** | % | 67.8 | Rp | 20,000,000 | |
| 2 | 12 | 01 | 2.02 | | | | **Persentase Penerbitan Akta Perceraian** | | % | 69.5 | | | |
| 2 | 12 | 01 | 2.02 | | | | **Persentase Penerbitan Akta Kematian** | | % | 100 | | | |
| 2 | 12 | 01 | 2.02 | 0003 | | Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pencatatan Sipil | Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pencatatan Sipil | | Laporan | 1 | Rp | 8,000,000 | APBD |
| 2 | 12 | 01 | 2.02 | 0006 | | Fasilitasi Terkait Pencatatan Sipil | Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pencatatan Sipil | | Laporan | 1 | Rp | 10,000,000 | APBD |
| 2 | 12 | 01 | 2.02 | 0004 | | Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil | Jumlah Laporan Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil | | Laporan | 1 | Rp | 2,000,000 | APBD |
| 2 | 12 | 04 | | | | **Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan** | **persentase Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerjasama** | **Terlaksananya Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan** | **%** | **84.84** | **Rp** | **35,200,000** | |
| 2 | 12 | 01 | 2.03 | | | **Keg Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan** | **Persentase Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan** | **Terwujudnya Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan** | **%** | **80** | **Rp** | **35,200,000** | |
| 2 | 12 | 01 | 2.03 | 0001 | | Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Non Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan | Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan | | Laporan | 1 | Rp | 12,950,000 | APBD |
| 2 | 12 | 01 | 2.03 | 0003 | | Sub Kegiatan Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan | Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan | | Laporan | 1 | Rp | 22,250,000 | APBD |
| 2 | 12 | 05 | | | | **Program Pengelolaan Profil Kependudukan** | **Persentase keserasian dan akurasi database kependudukan** | **Tercapainya Keserasian dan Akurasi database kependudukan** | **%** | **90** | **Rp** | **10,050,000** | |
| 2 | 12 | 01 | 2.01 | | | **Penyusunan Profil Kependudukan** | **Persentase Penyusunan Profil Kependudukan** | **Tersusunnya Profil Kependudukan** | **%** | **80** | **Rp** | **10,050,000** | |
| 2 | 12 | 01 | 2.01 | 0001 | | Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Data Kependudukan Kabupaten/Kota | | Laporan | 1 | Rp | 10,050,000 | APBD |
| | | | | | | | | | | | Rp | 5,226,510,551 | |

PEMERINTAH KOTA PANGKALPINANG
**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**
Jl. Rasakunda, Kel.Batu Intan, Kec. Girimaya, Kota Pangkalpinang (33143) Telpon (0717) 421 142
Faksimile (0717) 421 142 www.disdukcapil.pangkalpinangkota.go.id/. *e-mail* :
disdukcapil@pangkalpinangkota.go.id

# KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA PANGKALPINANG

NOMOR : B-900.1/108/DISDUKCAPIL/VIII/2024

TENTANG

## PENUNJUKKAN TIM KERJA PENYUSUNAN RENJA (RKT, RKA DAN DPA) ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH (APBD) KOTA PANGKALPINANG TAHUN ANGGARAN 2025

## KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA PANGKALPINANG,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka kelancaran untuk penyusunan RENJA (RKT, RKA dan DPA) pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pangkalpinang Tahun Anggaran 2025, perlu ditunjuk Tim Kerja;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pangkalpinang.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 04 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091), Undang- Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091), dan Undang –Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Repulik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

*Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN*

4. Undang–Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Lembaran Negara Republik Indonesia Nomo 5234);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

7. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

10. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 7 tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2007 Nomor 07 Seri E, Nomor 03);

11. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2016 Nomor 18);

12. Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 50 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unsur Pelaksana Teknis Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang (Berita Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2021 Nomor 50);

*Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN*

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PENUNJUKKAN TIM KERJA PENYUSUNAN RENJA (RKT, RKA DAN DPA) ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH (APBD) KOTA PANGKALPINANG TAHUN ANGGARAN 2025

KESATU : Menunjuk saudara-saudara yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tim bertugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu adalah sebagai berikut:
a. Menghimpun semua kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2025;
b. Mempersiapkan data-data yang diperlukan;
c. Menyusun RENJA (RKT, RKA dan DPA), tahun Anggaran 2025.

KETIGA : Masa kerja Tim Kerja Penyusunan RENJA berakhir setelah Tahun Anggaran berakhir atau sesuai masa penugasannya.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pangkalpinang pada
tanggal 01 Agustus 2024

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA PANGKALPINANG,

DARWIN, .S.Pd. Mat
Pembina Tk.I / IVb
NIP. 196807091994121002

*Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN*

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pangkalpinang
Nomor : B-900.1/108/DISDUKCAPIL/VIII/2024
Tanggal : 01 Agustus 2024

Penunjukkan Tim Kerja Penyusunan Renja (RKT, RKA dan DPA) Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota Pangkalpinang

Tahun Anggaran 2025

Lingkup Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pangkalpinang Tahun Anggaran 2025

1. Penanggungjawab : Kepala Dinas.
2. Ketua : Sekretaris Dinas.
3. Sekretaris : Kasubbag PEP dan Keuangan.
4. Tim Asistensi :
   1. Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk;
   2. Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil;
   3. Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data.
5. Anggota :
   1. Supriadi, SE;
   2. Aprilisa Madona Bachari, SE;
   3. Ahmad Zuhri, A.Md.

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA PANGKALPINANG,

DARWIN, .S.Pd. Mat
Pembina Tk.I / IVb
NIP. 196807091994121002

*Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN*